

**MAKNA KETUHANAN YANG MAHA ESA
(PERSPEKTIF AGAMA BUDHA DI NEGARA PANCASILA)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S1)
Ilmu Ushuluddin



Oleh :

MUHANANG
NIM: EO.23.97.006

FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN PERBANDINGAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2002

Halaman Persetujuan



Skripsi

Makna Ketuhanan Yang Maha Esa Perspektif Agama Budha di Negara Pancasila

Oleh

Muhanang

Nim : EO 23 97 006

Sudah dapat diajukan untuk dimunasaqahkan dalam ujian majelis munasaqah, guna memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana Ushulluddin jurusan Perbandingan Agama.

Surabaya, 16 Januari 2002

Dosen pembimbing

Drs. H. Syamsul Arifin

Nip : 150 197 393

PENGESAHAN

Skripsi in telah disidangkan dan dipertahankan dihadapan Dewan penguji skripsi
Fakultas Ushuluddin Surabaya IAIN Sunan Ampel dan telah diterima sebagai salah
satu syarat memperoleh gelar sarjana (S-1) dalam Ilmu Ushuluddin jurusan
Perbandingan Agama

Hari : Kamis
Tanggal : 23 Januari 2002



Mengesahkan
Dekan

Dr. Abdullah Khozin Affandi, M. A.
Nip : 150 190 692

Dewan Penguji

1. Drs. H. Syamsul Arifin (Ketua)
Nip : 150 197 393
2. Drs. Kunawi Basyir (Sekretaris)
Nip : 150 254 719
3. Drs. Mahmud Manan, M. A. (Penguji I)
Nip : 150 177 773
4. Drs. Hamzah Tulaeha, M. A. (Penguji II)
Nip : 150 227 501

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Penegasan Judul	6
D. Alasan Memilih Judul	7
E. Tujuan Pembahasan	8
F. Sumber-sumber Yang Dipergunakan	8
G. Metode Pembahasan	9
H. Teknik Pengumpulan Data	10
I. Sistematika Pembahasan	11

BAB II : EKSISTENSI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA

A. Sejarah Perumusan Pancasila	13
B. Kedudukan Pancasila di Negara Indonesia	20
C. Makna Ketuhanan Yang Maha Esa	27

BAB III : HAKEKAT NEGARA DALAM KEHIDUPAN BANGSA
INDONESIA

A.	Makna Negara	33
B.	Hubungan Antara Agama dan Negara	37
C.	Konsep Kehidupan Bernegara Agama Budha	42

BAB IV : AGAMA BUDHA DAN KONSEP TEOLOGINYA

A.	Teologi Agama Budha Dan Perkembangannya	
1.	Sidharta Gautama	48
2.	Mahayana	50
3.	Hinayana	52
B.	Pandangan Ketuhanan Yang Maha Esa Terhadap Konsep Ketuhanan Agama Budha	55

BAB V : ANALISIS71

BAB VI : KESIMPULAN

1.	Kesimpulan	76
2.	Saran	77

BAB VII : PENUTUP78

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang paling besar di dunia. Negara ini selalu terbuka untuk pemikiran-pemikiran dari luar dan telah terbukti ramah terhadap kebudayaan asing. Dari berbagai informasi, dapat disimpulkan bahwa pola religius Indonesia sebelum masuknya Islam sebelum 600-an Masehi adalah animistis. Pada abad awal, dikarenakan perjalanan laut Bangsa Indonesia ke pelabuhan-pelabuhan di India, budaya Hindhu-Budha mempengaruhi Indonesia. Penyebaran Agama Hindhu dikaitkan dengan penyebarannya kerajaan-kerajaan besar di Jawa. Setelah hampir satu milenium Hindhu-Budha mendominasi, kebudayaan Islam menyebar ke hampir seluruh Indonesia. Islam memasuki Asia Tenggara pada abad ke-11 Masehi. Kemudian berkembang selama setengah milenium berikutnya sampai kedatangan budaya Barat.¹

Tentang Agama Budha diyakini bahwa agama ini memasuki Indonesia lewat interaksi yang lebih populer. Misionaris Budha mengunjungi istana-istana di Indonesia, mengkhutbahkan ajaran, lalu mengajak para penguasa dan keluarganya untuk pindah ke agama mereka.

¹ Alwi Shihab, *Islam Inklusif; Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1998), hal. 3.

Melalui bentuk pengajaran seperti ini, mereka dapat mendirikan tatanan kependetaan. Lebih jauh pendeta-pendeta dari India juga mengatur pengiriman orang Indonesia yang telah beragama untuk mengunjungi biara Budha di India. Saat mereka kembali, orang Indonesia pemeluk Agama Budha mempromosikan ajaran dan filosofi Budha. Yang cukup menarik, tidak lama setelah kegiatan misionaris ini berjalan Agama Budha hampir menghilang dari asalnya, tetapi sebelumnya ia telah diperkenalkan, diajarkan dan berakar di berbagai tempat termasuk Indonesia.²

Masyarakat memiliki bakat religius dalam bentuk pengakuan dan pemujaan kepada Yang Maha Kuasa mengatasi keterbatasan manusia. Keterbukaan manusia Indonesia untuk bergaul dan menerima unsur budaya yang baik dari berbagai pihak termasuk negeri asing sehingga menyebabkan pembauran unsur-unsur budaya itu (akulturasi) membentuk kebudayaan baru yang lebih kaya. Semangat yang kuat berupa kekeluargaan telah menimbulkan ikatan sosial yang kukuh dalam masyarakat walaupun pada taraf awalnya masih dalam ikatan kesukuan yang terbatas. Rembug atau musyawarah yang digunakan di desa-desa untuk memecahkan berbagai persoalan bersama telah menjadi wahana serta lembaga kebersamaan masyarakat. Berbagai lembaga masyarakat telah terbentuk untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warganya. Kebudayaan asli Indonesia tersebut terbentuk kemudian berkembang diperkaya oleh unsur-unsur budaya Hindhu, Budha, Islam, Kristen serta pengaruh budaya dunia masa kini ketika

² Alwi Shihab, *ibid.*, hal. 5.

bangsa Indonesia mencari bentuk kebudayaan nasional Indonesia yang sesuai dengan dinamika perkembangan zaman.³

Setelah melalui perjuangan yang panjang melawan kolonial, Bangsa

Indonesia akhirnya memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17-8-1945. Sejak saat ini kehidupan bangsa Indonesia berubah terutama setelah berhasil membentuk landasan idiil yang memuat nilai-nilai keagamaan. Sebelum landasan idiil, ini terbentuk salah satu masalah pokok yang memerlukan pemecahan mendasar adalah hubungan antara agama dan negara. Seluruh anggota BPUPKI sepakat untuk mendirikan negara kebangsaan bukan negara yang mendasarkan agama tertentu. Walaupun demikian Negara Indonesia bukan Negara Sekuler yaitu negara yang sama sekali memisahkan dan tidak mengakui peranan agama dalam kehidupan bernegara. Berkat peran aktif Soekarno-Hatta, Pancasila diterima bulat sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Sebagai negara yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila secara utuh, Negara Republik Indonesia adalah yang berkedaulatan rakyat dan mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.⁴

Pancasila sebagai landasan idiil kehidupan bernegara membahas tentang kehidupan beragama, terutama sila I Ketuhanan Yang Maha Esa. Atas dasar inilah maka Indonesia sebagai negara kebangsaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa mengakui adanya enam agama yang eksis yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindhu, Budha. Sejarah

³ BP-7 Pusat, *Bahan Penataran P-4: Pancasila P-4* (Perum Percetakan Negara RI. 1996), hal. 21.

⁴ BP -7 Pusat. *Ibid.*, hal. 24-25.

membuktikan bahwa sebelum agama-agama besar masuk ke Indonesia dan mempengaruhi kebudayaan masyarakat kita. Berbagai suku asli telah mengenal nilai-nilai luhur yang akan menjadi unsur pembentuk nilai-nilai Pancasila. Karena posisinya penting dalam kehidupan bernegara dan beragama, maka setiap sisi dari masing-masing agama harus mempunyai cerminan darinya. Proses perumusan dan menyepakatinya berlangsung dalam relatif pendek, dan pada dasarnya merupakan proses musyawarah mufakat dalam rangkaian persidangan antar pemimpin.

Agama Budha adalah salah satu dari agama terbesar di Indonesia. Agama ini tidak mempunyai konsep teologi pada awalnya, sehingga Prof. Dr. Ahmad Shalaby ketika membahas tentang Agama Budha sampai pada pembahasan mengenai tuhan yang menyatakan bahwa Budha kadang-kadang lebih mirip dari pada segi pengingkaran dari pada segi pengakuan. Karena adanya pengesampingan soal Ketuhanan maka ada golongan Brahma pada zamannya telah mengecapnya sebagai Atheisme.⁵ Hal ini didasarkan pada masalah terpenting yang dilakukan ajaran budha adalah pembebasan dari pengakuan kelahiran serta sampainya di Nirwana. Ajaran ini sebagai solusi dari hakekat falsafahnya yaitu tentang kedukaan atau penderitaan yang dihasilkan dari kecenderungan hawa nafsu.⁶

Di pihak lain Joachim Wach ketika membahas tentang Religious Exsperience sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada agama “ tanpa tuhan

⁵ Ahmad Shalaby, *Perbandingan Agama : Agama-agama Besar di India Hindhu-Jaina- Budha* (Jakarta : Bumi Aksara, 1998), hal. 145.

“ dan hanya merupakan kesalah fahaman belaka yang menyebabkan Agama Budha dipandang demikian. Boleh jadi Agama Budha pada mulanya kritikan terhadap tradisi atau terhadap setiap pemberian sifat positif atas realitas mutlak. Tetapi, keduanya berkembang menjadi agama-agama yang sebenarnya.⁷

Religious Experience di dasarkan pada pengakuan adanya pengalaman keagamaan murni yang dapat diidentifikasi dengan menggunakan kriteria terhadap ungkapan –ungkapan apapun. Kriteria yang pertama ialah bahwa pengalaman itu merupakan suatu tanggapan terhadap apa yang dihayati sebagai Realitas Mutlak. Yang dimaksud Realitas Mutlak adalah realitas yang menentukan dan mengikat segala-galanya. Kedua, pengalaman keagamaan harus dipandang sebagai suatu tanggapan menyeluruh dari makhluk utuh terhadap Realitas Mutlak, berarti pribadi yang utuhlah terlibat bukan sekedar fikiran, perasaan atau kehendak saja. Ketiga, adalah kedalamannya (intensity). Keempat, bahwa pengalaman tersebut dinyatakan dalam perbuatan.⁸

Sehingga persoalan kehidupan keagamaan dalam konteks bernegara menjadi masalah penting untuk memperkukuh keberadaannya. Hal ini mengacu pada landasan teori dan prakteknya dalam kehidupan bernegara, sehingga antara agama dan negara terjalin hubungan yang sinergis untuk kemaslahatan umat beragama dan masyarakat negara menjadi manusia seutuhnya yang mempunyai muatan religius.

⁶ Ahmad Shalaby, *ibid.*, hal. 139.

⁷ Joachim Wach, *Ilmu Perbandingan Agama : Inti dan Bentuk pengalamam Keagamaan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 54.

⁸ Joachim Wach, *ibid.*, hal. 44-52.

B. Rumusan Masalah

Untuk memperoleh kejelasan tentang pembahasan ini, maka perlu digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id ditampilkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana eksistensi Pancasila dalam kehidupan bernegara ?
2. Bagaimana konsep ketuhanan Agama Budha ?
3. Bagaimana pandangan Ketuhanan Yang Maha Esa terhadap konsep ketuhanan Agama Budha.?

C. Penegasan Judul

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan konkret tentang permasalahan yang terkandung di dalam judul sebagaimana yang dimaksud, maka perlu memperjelas pengertian dari sudut arti katanya yang dimaksud dengan judul : MAKNA KETUHANAN YANG MAHA ESA (PERSPEKTIF AGAMA BUDHA DI NEGARA PANCASILA) adalah :

Makna adalah pengertian yang diberikan kepada bentuk kebahasaan.⁹

Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan sifat atau keadaan tuhan.¹⁰

Yang Maha : amat,¹¹ Esa : tunggal.¹²

Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.¹³

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia II* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hal. 619.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 965.

¹¹ *Ibid.*, hal. 542.

¹² *Ibid.*, hal. 236.

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *ibid.*, hal. 760.

Agama Budha adalah ajaran yang dibawa Sidharta Gautama bermula dari pembawanya itu maka ajarannya disebut ajaran Budha atau ajaran Agama Budha sebagai dikenal saat ini.¹⁴

Di adalah kata perangkai yang menyatakan ada pada sesuatu tempat.¹⁵

Negara adalah suatu kehidupan kelompok manusia.¹⁶

Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia.¹⁷

D. Alasan Memilih Judul

Penulis sengaja memilih judul sekaligus sebagai tema dalam karya ini, karena pertimbangan sebagai berikut :

1. Judul tersebut merupakan refleksi penyusun terhadap kondisi Agama Budha. Pada agama ini tidak ada konsep mengenai Ketuhanan seperti Allah pada agama Islam, Brahman pada agama Hindhu, Ahura Mazda pada agama Zoroaster, sehingga perlu mengkaji pandangan agama budha terhadap makna Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan bernegara di Indonesia.
2. Sepanjang pengetahuan penulis, tema atau judul ini belum ada mahasiswa lain yang mengungkap pembahasan ini.

¹⁴ Joesoef Sou'yb, *Agama-agama Besar di Dunia* (Jakarta : Pustaka Al Husna , 1983), hal. 28.

¹⁵ W. J. S. Purwadarminta , *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1993), hal. 248.

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , *op. cit.* , hal. 12.

¹⁷ Laboratorium Pancasila Ikip Malang , *Santiaji Pancasila* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hal. 11.

3. Judul atau tema yang dikaji erat kaitannya dengan studi ushuluddin

khususnya Ilmu Perbandingan Agama.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

E. Tujuan Pembahasan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan ini adalah ;

1 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengungkap eksistensi Pancasila dalam kehidupan bernegara.
- b. Untuk mengungkap konsep ketuhanan Agama Budha
- c. Untuk mengungkap pandangan Ketuhanan Yang Maha Esa terhadap konsep ketuhanan Agama Budha.

2 Tujuan Umum.

Ingin mengimplementasikan wawasan penulis, sehingga dapat menciptakan suatu bentuk karya ilmiah yang memiliki sumber rujukan yang relevan dengan permasalahan.

F. Sumber-sumber Yang Dipergunakan.

Sumber-sumber yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

Library Research dari sejumlah :

1. Buku-buku Agama Budha.
2. Sejumlah literatur yang diperoleh dari buku-buku yang ada hubungannya dengan isi pokok bahasan dalam skripsi ini.

G. Metode Pembahasan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah suatu metode yang digunakan untuk mengkaji suatu masalah dari sudut pandang tertentu agar dapat dibahas sesuai dengan tujuan pembahasan. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam mengkaji masalah – masalah yang berkaitan dengan pandangan Agama Budha terhadap makna Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan bernegara di Indonesia sebagai berikut :

a. Metode Historis yaitu suatu metode dengan membuat rekonstruksi masa lampau secara obyektif dengan mengumpulkan , mengevaluasi serta menjelaskan dan mensintesis bukti-bukti untuk menegaskan kebenaran dari fakta kemudian menarik kesimpulan secara tepat.¹⁸

b. Metode Sosiologis yaitu penelitian mengenai hubungan antara agama dengan masyarakat dalam kerjasama mereka yang saling tergantung dan juga hasil penelitian perwujudan proses social yang terjadi atas pengaruh agama.¹⁹

¹⁸ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal. 56.

2. Metode Pembahasan.

a. Metode Induktif.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Metode induktif yaitu suatu metode yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada pengetahuan umum itu kita hendak menilai suatu kejadian khusus.

b. Metode Deduktif.

Metode Deduktif yaitu suatu metode yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa konkret dan kemudian fakta atau peristiwa khusus konkret itu ditarik generalisasi-generalisasi sifat umum.²⁰

c. Metode Komparatif.

Metode Komparatif yaitu analisis data dengan jalan membandingkan dari pendapat yang telah ada untuk mengetahui data yang lebih valid.

H. Teknik Pengumpulan Data.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data yaitu dokumentasi. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar dan sebagainya.²¹

¹⁹ Romdon, *Metodologi Ilmu Perbandingan Agama: Suatu Pengantar Awal* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 106.

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Jakarta: Andi Offset, 1991), Hal. 92.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 202.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk menentukan kerangka pembahasan yang jelas dalam skripsi ini, penulis membagi sistematika pembahasan menjadi beberapa bab sebagai berikut:

Bab Pertama : berisikan pembahahasan yangh meliputi , latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan judul, alasan memilih judul, tujuan pembahasan, sumber-sumber yang digunakan, metode pembahasan, tehnik pengumpulan data,sistematika pembahasan.

Bab kedua : berisikan mengenai Eksistensi Pancasila dalam kehidupan bernegara yang terdiri dari :

- a. Sejarah perumusan Pancasila
- b. Kedudukan Pancasila di negara Indonesia.
- c. Makna Ketuhanan Yang Maha Esa

Bab Ketiga : berisikan pembahasan mengenai hakikat negara dalam kehidupan Bangsa Indonesia yang terdiri dari:

- a. Makna Negara.
- b. Hubungan Antara Agama dan Negara
- c. Konsep kehidupan bernegara Agama Budha.

Bab Keempat : berisikan pembahasan mengenai Agama Budha dan konsep

teologinya yang terdiri dari :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

a. Teologi Agama Budha dan perkembangannya.

1. Sidarta Gautama.

2. Hinayana.

3. Mahayana.

b. Pandangan Ketuhanan Yang Maha Esa terhadap

konsep Ketuhanan Agama Budha.

Bab kelima : berisikan pembahasan mengenai analisis

Bab keenam : berisikan pembahasan mengenai kesimpulan dan saran.

Bab Ketujuh : berisikan mengenai penutup.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

EKSISTENSI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BANGSA INDONESIA

A. Sejarah Perumusan Pancasila

Untuk menggambarkan pluralitas masyarakat dan budaya Indonesia, para pendiri republik pada tahun 1945 telah mengumandangkan sebuah motto nasional *Bhinneka Tunggal Ika*. Motto ini diambil dari formulasi pujangga *Empu Tantular*, seorang pemikir cemerlang pada zaman kerajaan Hindu Majapahit. Para penguasa kerajaan Majapahit yang muncul sebagai kerajaan Hindu terbesar sebelum kedatangan Islam di Indonesia menggunakan motto tersebut untuk menjaga kesatuan seluruh rakyat dan menjaga integritas wilayah kerajaan. Dipergunakannya kembali motto ini oleh para pendiri republik ini sebagai motto nasional merefleksikan impian politik mereka demi masyarakat persatuan nasional, integritas dan stabilitas Negara Indonesia.¹

Meskipun demikian negara yang baru terbentuk ini membutuhkan lebih dari sekedar motto tetapi membutuhkan sebuah ideologi. Karena itu menjelang proklamasi kemerdekaan 1945 digunakan Pancasila sebagai dasar filosofis dan ideologi nasional negara, serta sebagai pandangan hidup

masyarakat Indonesia. Para wakil dari kelompok Nasionalis Muslim dan Nasionalis Sekuler terlibat dalam perdebatan mengenai apakah Islam atau Pancasila yang akan digunakan sebagai dasar falsafah Negara Indonesia. Nasionalis Sekuler adalah kelompok pemimpin politik Indonesia – Muslim, Katolik Protestan, Hindhu dan yang lain secara tegas menolak agama sebagai dasar negara. Meskipun secara personal mereka bukan kaum sekularis dan tidak kurang dalam hal tendensi keagamaan. Mereka memilih untuk tidak menggunakan agama sebagai sebuah ideologi atau sistem politik. Sebaliknya yang dimaksud dengan Nasionalis Muslim adalah kelompok pemimpin muslim yang terikat dengan keimanan mereka secara mendalam dan mempercayai bahwa Islam harus dipergunakan sebagai dasar negara. Mereka percaya antara politik dan islam tidak dapat dipisahkan karena tidak ada pemisahan antara persoalan duniawi dengan persoalan ukhrowi dalam ajaran agama.²

Pada tanggal 7-12-1941 meletus perang pasifik dengan dibomnya Pearl Harbour oleh Jepang. Dalam waktu yang singkat jepang dapat menduduki daerah-daerah jajahan sekutu (Amerika, Inggris ,Belanda) di daerah pasifik. Pada pada tanggal 9-3-1942 Jepang masuk Indonesia menghalau penjajah Belanda. Untuk mendapat bantuan rakyat Indonesia, Jepang mempropagandakan bahwa kehadirannya di indonesia adalah membebaskan tanah air Indonesia dari cengkraman penjajah Belanda. Tetapi

¹ Faisal Ismail , *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama : Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hal. 2.

kenyataan yang dihadapi Bangsa Indonesia pada waktu itu adalah sesungguhnya Jepang penjajah yang sama kejamnya dengan Belanda. Perang pasifik menunjukkan tanda-tanda akan berakhir dengan kekalahan Jepang dimana-mana. Untuk mendapat bantuan dari rakyat Indonesia, maka Jepang mencoba menarik hati Bangsa Indonesia dengan menggunakan janji Indonesia merdeka kelak di kemudian hari jika perang telah selesai.

Pada tanggal 1 Maret 1945 Jepang mengumumkan akan dibentuk suatu badan yaitu BPUPKI. Badan ini kemudian terbentuk pada tanggal 29 April 1945 tetapi baru dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dan mulai baru bekerja pada tanggal 29 Mei 1945. Pada tanggal 29 Mei 1945 badan penyelidik mengadakan sidang yang pertama, sedangkan Mr. Muh. Yamin mendapat kesempatan pertama mengemukakan pidatonya dihadapan sidang lengkap Badan Penyelidik. Pidato Mr. Muh. Yamin berisi lima asas dasar untuk Negara Indonesia merdeka, yaitu : 1) Peri Kebangsaan, 2) Peri Kemanusiaan, 3) Peri Ketuhanan, 4) Peri Kerakyatan, 5) Kesejahteraan rakyat. Setelah pidato ia menyampaikan mengenai usul tertulis rancangan UUD RI. Di dalam pembukaan rancangan UUD tercantum rumusan lima asas dasar negara yang berbunyi : 1) Ketuhanan Yang Maha Esa, 2) Kebangsaan persatuan indonesia, 3) Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab,

² Faisal Ismail, *ibid.*, hal. 4-5.

4) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³ Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengucapkan pidato dihadapan sidang hari ketiga Badan Penyelidik. Dalam pidato itu disampaikan lima hal untuk menjadi dasar negara merdeka yang perumusan sistematikanya sebagai berikut :

1) Kebangsaan Indonesia, 2) Internasionalisme atau Perikemanusiaan, 3) Mufakat atau Demokrasi, 4) Kesejahteraan Sosial , 5) Ketuhanan yang berkebudayaan . Untuk lima dasar negara itu oleh beliau diusulkan agar diberi nama Pancasila.⁴

Pada tanggal 22 Juni 1945 sembilan tokoh nasional yaitu : Ir. Soekarno, Drs. Moh Hatta, Mr. A. A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdulkahar Muzakir , Haji Agus Salim, Mr. Achmad Soebarjo, K. H. Wachid Hasym, Mr. Muh. Yamin mengadakan rapat untuk membahas pidato serta asal-usul mengenai asas dasar negara yang telah dikemukakan dalam sidang-sidang Badan Penyelidik. Maka disusunlah piagam yang kemudian dikenal dengan “ Piagam Jakarta “ yang didalamnya terdapat rumusan dan sistematika Pancasila sebagai berikut :

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.

³ Laboratorium Pancasila Ikip Malang , *Santiaji Pancasila : Suatu Tinjauan Filosofis, Historis dan Yuridis Konstitusional* (Surabaya : Usaha Nasional, 1981), hal . 28.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Piagam Jakarta yang di dalamnya terdapat perumusan dan sistematika pancasila sebagaimana diuraikan di atas kemudian diterima oleh Badan Penyelidik dalam sidang ke-2 tanggal 14-16 juli 1945.⁵

Sehari sebelum sidang pleno PPKI tanggal 18 Agustus 1945, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 sore hari terjadi peristiwa yang sangat penting menyangkut perumusan sila pertama Pancasila hasil dari panitia kecil tanggal 22 juni 1945 yang sudah disetujui. Pada sore itu telah datang kepada Bung Hatta seorang opsir jepang yang disertai Nisyijima, pembantu Admeral Maeda. Sebagai utusan Kaigen untuk memberitahukan dengan sungguh-sungguh bahwa wakil Protestan dan Katolik dalam daerah yang dikuasai Jepang sangat keberatan terhadap kalimat dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Mereka menyakini bahwa kalimat itu tidak mengikat mereka hanya mengenai rakyat yang beragama Islam. Tetapi tercantumnya ketetapan seperti itu dalam dasar yang menjadi pokok UUD berarti mengadakan diskriminasi terhadap golongan minoritas. Jika

⁴ Laboratorium Pancasila Ikip Malang, *ibid.*, hal. 28.

⁵ Laboratorium Pancasila Ikip Malang, *ibid.*, hal. 30.

“ diskrimasi “ itu juga ditetapkan maka mereka lebih suka berdiri diluar Republik Indonesia.

Persoalan ini menjadi perhatian yang serius dari Bung Hatta karena adanya perpecahan di kalangan Bangsa Indonesia yang baru saja menyatakan kemerdekaannya. Kalau hal itu terjadi maka perjuangan Bangsa Indonesia yang sudah bertahun-tahun untuk mencapai indonesia merdeka yang bersatu akan sia-sia. Oleh karena itu, pada esok harinya yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 sebelum dilangsungkan sidang PPKI untuk mengesahkan UUD, Bung Hatta mengajak beberapa tokoh umat Islam yng duduk dalam PPKI yaitu : Ki Bagus Hadikusumo, A. Hahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimejo dan Mr. Teuku Hasam mengadakan pertemuan pendahuluan untuk membicarakan masalah tersebut (informasi yang diterima tanggal 17 agustus 1945 sore itu).⁶ Dalam rapat ini setelah melalui perdebatan-perdebatan sengit, dalam waktu kurang dari 15 menit mereka dapat mengambil keputusan mengenai suatu masalah prinsip yang dapat membahayakan keutuhan bangsa dan negara.

Keputusan serta perubahan yang sangat penting yaitu mengenai perubahan pada perumusan Pancasila yang terdapat pada alinea IV dari rancangan pembukaan. Pada sila pertama sebelumnya dirumuskan dengan kalimat-kalimat sebagai berikut : “ Ketuhanan dengan menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya” sekarang diganti dengan rumusan “ Ketuhanan Yang Maha Esa “ .Sehingga pada pembukaan UUD 1945 yang telah

ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 tersebut rumusan Pancasila sebagai berikut : 1) Ketuhanan Yang Maha Esa, 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab , 3) Persatuan Indonesia, 4) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan , 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia . Perubahan yang telah disepakati oleh lima orang tersebut kemudian disetujui oleh sidang pleno PPKI dengan suara bulat .⁷

Perubahan yang telah dilakukan ini adalah kebijaksanaan yang diambil dengan penuh kesadaran oleh para anggota PPKI, terutama atas kebesaran para pemimpin Islam demi persatuan dan kesatuan bangsa (sama-sama dijajah, sama-sama merdeka dan bersatu). Tanpa adanya sikap yang penuh pengertian dari tokoh-tokoh Islam waktu itu keadaannya akan mempunyai kelanjutan yang lain dari sekarang ini. Maka jelas pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI telah mengesahkan Undang-Undang Dasar negara yang disebut dengan UUD 1945, di dalam pembukaan alinea ke-4 tercantum rumusan Pancasila yang berbunyi sebagai berikut : 1) Ketuhanan Yang Maha Esa, 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3) Persatuan Indonesia, 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan / perwakilan. Rumusan dasar Negara Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 inilah yang benar dan syah, karena disamping mempunyai kedudukan konstitusional juga disyahkan oleh suatu badan yang

⁶ H. Alamsyah Ratu Perwiranegara, *Kehidupan Beragama Dalam Negara Pancasila* (Jakarta: Departemen Negara RI, 1982), hal. 30-31.

⁷ Rozali Abdullah, *Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 13.

mewakili seluruh Bangsa Indonesia (Panitia Persiapan Kemerdekaan)
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 yang berarti disepakati oleh seluruh Bangsa Indonesia.⁸

B. Kedudukan Pancasila di Negara Indonesia

Memahami hakekat Pancasila berarti memahami makna pokok (mendasar, hakiki, esensi, utama) nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara RI. Artinya kedudukan dan fungsi pokok Pancasila dalam negara kita adalah sebagai Pandangan Hidup (filsafat Hidup) bangsa dan dasar negara (filsafat negara) Indonesia. Kedua fungsi dan kedudukan ini adalah yang pokok dan utama. Dari kedua dan kedudukan fungsi demikian terbentuklah berbagai fungsi yang lain, misalnya: sebagai jiwa dan kepribadian bangsa , ideologi nasional, sumber cita-cita dan tujuan nasional, perjanjian luhur rakyat Indonesia , bahkan norma dasar dan kriteria dasar watak/ kepribadian manusia Indonesia. Jadi, dari kedudukan nilai Pancasila yang pokok dan hakiki inilah lahir berbagai nilai dan fungsi Pancasila yang melandasi berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara.⁹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa Indonesia

Dalam perjuangan menuju kehidupan yang lebih sempurna , sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, manusia memerlukan nilai-nilai yang dianutnya sebagai pandangan hidup . Nilai luhur adalah

⁸ Laboratorium Pancasila Ikip Malang , *op. cit.* , hal. 32.

⁹ Laboratorium Pancasila Ikip Malang, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi Negeri* (Malang: Ikip Malang, 1988) , hal. 6.

tolak ukur kebaikan yang berkenaan dengan hal-hal mendasar dan abadi dalam kehidupan manusia. Hal tersebut dapat dilihat dalam cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan ini. Pandangan hidup yang terdiri dari kesatuan rangkain nilai-nilai luhur itu adalah wawasan menyeluruh terhadap kehidupan itu sendiri. Pandangan hidup berfungsi sebagai kerangka acuan, baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun untuk menata hubungan antara manusia, masyarakat dan alam sekitarnya. Pandangan hidup tersebut merupakan landasan serta dasar untuk membentuk berbagai lembaga penting bagi kehidupan. Fungsi lembaga yang dibentuk manusia adalah sebagai instrumen, sarana dan wahana untuk mewujudkan pandangan hidupnya dalam kenyataan sehari-hari. Tanpa adanya dukungan lembaga, pandangan hidup adalah sekedar merupakan konsepsi yang abstrak, tanpa daya untuk mewujudkan dirinya dalam kenyataan.

Pada hakekatnya terdapat hubungan timbal-balik yang bersifat dinamis antara pandangan hidup masyarakat, pandangan hidup bangsa dan pandangan hidup negara . Dalam proses perumusannya pandangan hidup masyarakat dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup negara. Pandangan hidup bangsa dapat disebut sebagai ideologi

¹⁰ BP-7 Pusat, *Pancasila / P-4* (Perum Percetakan Negara RI, 1996), hal. 1.

nasional dan pandangan hidup negara sebagai ideologi negara. Tidak seluruh pandangan hidup masyarakat, khususnya dalam masyarakat majemuk dapat diangkat sebagai pandangan hidup bangsa. Dengan demikian, ada proses seleksi secara sadar bahwa pandangan hidup negara diproyeksikan kembali kepada pandangan hidup bangsa, dan pandangan hidup bangsa diproyeksikan kembali kepada pandangan hidup masyarakat serta kepada sikap hidup pribadi.¹¹

Manusia di dunia ini selalu dihadapkan kepada masalah-masalah pokok hidupnya yang meliputi : masalah hidupnya sendiri terhadap Tuhan, terhadap segala sesuatu yang ada diluar dirinya. Untuk memecahkan masalah hidup ini manusia agak berpijak pada pandangan hidupnya yang merupakan pencerminan dari seluruh hidup budayanya. Tiga masalah hidup itu, kiranya merupakan masalah pokok yang dihadapi manusia. Maka hal itu menjadi umum sifatnya.¹² Dalam hal ini Pancasila dengan kelima silanya telah mencakup ketiga permasalahan manusia di dalam hidupnya: 1) permasalahan manusia terhadap dirinya sendiri, berkaitan dengan sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab, 2) permasalahan manusia terhadap Tuhan, berkaitan dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, 3) permasalahan manusia terhadap segala sesuatu diluar dirinya, berkaitan dengan sila ketiga, keempat,

¹¹ BP-7 Pusat, *ibid.*, hal. 2-3.

¹² Bambang Daroeso dan Sunyahmo, *Filsafat Pancasila* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1991), hal. 25.

kelima yaitu : Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan/ perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan pengertian tersebut di atas, Pancasila mencerminkan unsur-unsur kehidupan budaya, adat-istiadat, keagamaan dan unsur kenegaraan di tanah air kita.¹³

Pandangan hidup bangsa yang berisikan nilai-nilai hidup yang meliputi nilai kebenaran, nilai kebaikan dan nilai keindahan serta nilai religius akan menjelma menjadi sikap dan cara-cara hidup yang berarti bahwa pandangan hidup itu akan mendasari , menjiwai dan mengarahkan perbuatan dan cara hidup Bangsa Indonesia. Sehingga Pancasila dalam pengertian ini disebut Way of Life Welthancaung, pandangan dunia, pandangan hidup, pegangan hidup, pedoman hidup, petunjuk hidup. Dalam hal ini Pancasila digunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari (pancasila diamalkan dalam hidup sehari-hari). Dengan kata lain Pancasila digunakan sebagai penunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup disegala bidang. Ini berarti, bahwa semua tingkah laku dan tindakan perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupan pancaran dari semua nilai Pancasila. Karena pancasila sebagai Way of Life Welthanchaung selalu merupakan satu kesatuan , tidak bisa dipisah-pisahkan satu dengan yang lain. Keseluruhan sila di dalam Pancasila merupakan satu kesatuan organis.¹⁴

¹³ Bambang Daroeso dan Sunyahmo, *ibid...*, hal. 26.

¹⁴ Laboratorium Pancasila Ikip Malang, Santiaji Pancasila, *op. cit.*, hal. 16.

Bangsa Indonesia mewarisi nilai budaya yang melandasi tata kehidupannya. Sari dan puncak sosiobudaya ini ialah nilai-nilai yang melandasi tata kehidupan. Sari dan puncak nilai dalam sosiobudaya ini terutama : Keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai maha pencipta semesta, pengayom alam semesta. Kepada manusia menaruh kepercayaan dan harapan bagi hidup di dunia dan sesudah mati. Inilah asas kehidupan ketuhanan dan keagamaan. Asas kekuargaan, cinta dan kebersamaan sebagai satu keluarga ayah, ibu, anak. Cinta dan kekeluargaan ini dasar terbentuknya masyarakat (kampung, desa, marga, sampai negara) kesatuan dan kerukunan. Asas musyawarah mufakat : kebersamaan adalah kumpulan banyak pribadi, warga dan keluarga. Kemajuan dan kemampuan warga masyarakat berbeda-beda. Supaya mereka tetap rukun bersatu, keputusan ditetapkan atas dasar musyawarah mufakat. Asas gotong-royong : kebersamaan memikul beban tanggung jawab demi kepentingan bersama. Keputusan yang diambil atas dasar musyawarah mufakat untuk kebersamaan adalah tanggung jawab bersama. Jadi dilaksanakan bersama secara gotong-royong oleh dan untuk kebersamaan. Asas tenggang rasa atau tepo seliro : saling menghayati keadaan dan perasaan antar warga, antar pribadi, asas saling menghormati dan menghargai dalam keragaman dan perbedaan. Saling menghormati hak, pendapat , keyakinan dan agama

msing-masing demi terpeliharanya kesatuan dan keharmonisan hidup bersama.¹⁵

Demikian pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa Indonesia. Dilihat dari kedudukannya, Pancasila mempunyai kedudukan yang tinggi, yakni cita-cita dan pandangan hidup Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

b. Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia

Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI diantaranya menetapkan UUD 1945 dalam kalimat daripada pembukaannya bahwa “ Disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ; Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”¹⁶ Kata-kata “ dengan berdasar kepada “ tersebut menentukan kedudukan Pancasila dalam Negara Republik Indonesia sebagai dasar negara dalam “ dasar filsafat “ . Dari pembicaraan oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Pesiapan Kemerdekaan Indonesia menjelang proklamasi kemerdekaan dapat

¹⁵ Laboratorium Pancasila Ikip Malang , Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi Negeri , *op. cit.* , hal. 6-7.

¹⁶ Miftahudin Zuhri, *Pancasila : Tinjauan Historis, Yuridis, Konstitusional dan Pelaksanaannya* (Yogyakarta: Liberty, 1985), hal. 61-62.

disimpulkan bahwa dasar dimaksudkan sebagai “ dasar filsafat “. Adapun yang dimaksud dengan pancasila sebagai “ dasar filsafat “

Negara Republik Indonesia di sini adalah bahwa Pancasila itu sebagai sesuatu hal yang dicita-citakan, yang harus diwujudkan dalam kehidupan Bangsa Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila adalah sebagai ideologi yang harus diwujudkan dalam kehidupan Negara Republik Indonesia.¹⁷

Jelaslah bahwa Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia merupakan dasar yang paling fundamental. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Drs. Notonagoro S. H. dalam tulisan beliau yang berjudul “ Berita pikiran ilmiah tentang jalan keluar dari kesulitan mengenai Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia “ antara lain dijelaskan bahwa “ diantara unsur-unsur pokok kaedah negara yang fundamental Asas Kerohanian Pancasila mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum Bangsa Indonesia “ .

Dibagian lain juga dijelaskan bahwa norma hukum yang pokok dan disebut pokok kaedah negara fundamental daripada negara itu dalam hukum mempunyai hakekat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tidak berubah bagi negara yang dibentuk, dengan kata lain jalan hukum tidak dapat diubah.¹⁸

Pendapat diatas menjelaskan, betapa fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai kaedah pokok negara yang fundamental. Hal ini penting sekali, karena UUD baik tertulis maupun yang tidak tertulis

¹⁷ Miftahudin Zuhri, *ibid.*, hal. 62.

harus bersumber dan berada di bawah pokok negara yang fundamental. Maka Pancasila mempunyai kedudukan mengikat secara hukum seluruh tatanan hidup bernegara. Dan yang bertentangan dengan Pancasila sebagai kaedah hukum konstitusional pada dasarnya tidak berlaku dan harus dicabut.¹⁹

Susunan tata nilai kebangsaan dan kenegaraan indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dapat dirumuskan sebagai berikut :Pancasila (dasar negara, filsafat negara, dan ideologi nasional) adalah landasan idiil kenegaraan indonesia. UUD 1945 (konstitusi negara, hukum dasar tertulis negara) adalah landasar struktural dan konstitusional kenegaraan dan kebangsaan indonesia. Tap MPR (kebijakan negara, kebijakan nasional) adalah landasan operasional kenegaraan dan kebangsaan indonesia. Ketiga nilai ini barangkali dan mencerminkan kenegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara menjelma sebagai sistem kenegaraan.²⁰

C. Makna Ketuhanan Yang Maha Esa

1. Secara etimologi

Imbuhan gabungan ke-an adalah awalan ke- dan akhiran -an yang secara bersama-sama diimbuhkan pada sebuah kata dasar atau bentuk dasar. Pengimbuhanannya dilakukan secara serentak. Artinya,

¹⁸ Bambang Daroeso dan Sunyahmo, *op. cit.*, hal. 31.

¹⁹ Bahan Penataran P-4, *op. cit.* hal. 9.

awalan ke- dan akhiran -an itu secara bersama-sama diimbuhkan pada sebuah kata dasar atau bentuk dasar. Umpamanya pada kata dasar Tuhan sekaligus diimbuhkan awalan ke- dan akhiran -an itu sehingga langsung menjadi Ketuhanan. Kalau dibagikan proses pembentukan kata Ketuhanan adalah: ke- Tuhan -an. Sehingga fungsi imbuhan gabungan ke- / -an adalah membentuk kata benda abstrak dan sejumlah kata kerja. Sedangkan makna yang didapat sebagai hasil pengimbuhan antara lain menyatakan : Hal atau peristiwa sebagai suatu keadaan/ sifat sedikit bersifat, hal atau masalah. Contoh : Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga imbuhan gabungan ke- -an dengan contoh Ketuhanan Yang Maha Esa menyatakan tiga hal di atas dengan makna bahwa masalah Tuhan keadaannya atau bersifat Esa.²¹

Ditinjau dari bentuk kata-katanya maka sila-sila Pancasila tersebut intinya terbentuk dari suatu kata dasar ditambah afiks sebagai berikut :

Bentuk dasar	afiks	kata berafiks
Tuhan	(ke-/-an)	Ketuhanan
Manusia	(ke-/-an)	Kemanusiaan
Satu	(ke-/-am)	Kesatuan
Rakyat	(ke-/-an)	Kerakyatan
Adil	(ke-/-an)	Keadilan

²⁰ Laboratorium Pancasila Ikip Malang, Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi, *op. cit.*, hal. 10-11.

²¹ Abdul Chaer, *Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 260.

Kata-kata yang mendapat imbuhan (ke- / -an) secara semantik menyatakan makna “abstrak ” atau “ hal “ . Dan kata-kata Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, Keadilan berdasar suatu analisis morfologis juga mengandung makna abstrak.²² Kata-kata di atas seluruhnya merupakan inti frase pada setiap sila, oleh karena itu kata-kata tersebut di dalam ilmu logika di sebut subjek (s) dan disebut term. Oleh karena fungsinya sebagai term, maka kata-kata tersebut mempunyai luas pengertian dan bersifat umum universal. Luas pengertiannya menunjukkan luas pengertian umum seumum-umumnya, tidak terikat ruang, waktu lingkungan, kelompok atau jumlah tertentu. Maka Ketuhanan menunjukkan hakekat abstrak Tuhan dan realisasinya adalah berupa nilai-nilai agama (yang datang dari tuhan).²³

Karena sifatnya abstrak, umum, universal, maka arti Pancasila itu bersifat tetap dan tidak berubah. Hal ini berarti Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Indonesia mempunyai kedudukan yang mutlak terletak pada kelangsungan hidup Negara Indonesia secara materiil karena semua aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila.

²² Kaelan , *Filsafat Pancasila* (Yogyakarta : Paradigma, 1996), hal. 62.

²³ Kaelan, *ibid.*, hal. 92.



2. Secara Terminologi

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Makna sila Ketuhanan Yang Maha Esa tidak bisa dipisahkan

dengan makna agama di Indonesia, karena kausa materials (sebab yang berupa bahan) adalah Bangsa Indonesia yang sejak dulu telah memiliki nilai-nilai agama. Oleh karena itu makna sila pertama tersebut perlu di jelaskan atas dasar kausa materials dalam proses terbentuknya pancasila. Hal ini mengingat bahwa proses terbentuknya pancasila selain sebagai hasil perenungan jiwa yang dalam juga merupakan suatu hasil konsensus filsafat (philosophical consensus) dan konsensus politik (political consensus). Oleh karena itu inti sila pertama yang abstrak, umum, universal harus sesuai dengan praktek penyelenggaraan negara, moral penyelenggara negara dan juga penjabaran dalam tata tertib hukum indonesia.

Dalam kaitannya dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa mempunyai makna bahwa segala aspek penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. Bila dirinci masalah yang mempengaruhi penyelenggaraan negara antara lain : penyelenggaraan negara yang bersifat materiil maupun penyelenggaraan negara yang bersifat spiritual. Yang bersifat materiil antara lain : bentuk negara, tujuan negara, tertib hukum, sistem negara. Adapun yang bersifat spiritual antara lain : moral negara, moral para penyelenggara negara dan lain sebagainya. Oleh karena itu secara obyektif hubungan

antara Tuhan , manusia dan negara mempunyai hubungan yang langsung dan tidak langsung.

Kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan merupakan asal segala sesuatu atau sebagai sebab yang pertama. Sehingga segala sesuatu di alam semesta ini termasuk manusia ini berasal dari Tuhan. Hal ini berarti manusia dan tuhan sebagai akibat yang langsung . Menurut Trueblood, hubungan antara manusia dan tuhan adalah timbal balik, yaitu manusia mencari tuhan akan tetapi tuhan juga memperhatikan manusia. Hubungan ini bersifat langsung dan vertikal. Serta nilai-nilai yang berkaitan dengan masalah hubungan manusia dengan tuhan hanya terdapat dalam wahyu sebagai petunjuk dari ajaran agama masing-masing sesuai dengan pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Dalam pengertian ini negara memberikan jaminan hukum kepada setiap warganegara untuk memeluk agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, dan negara tidak akan campur tangan terhadap keyakinan agama para warga negara karena hal itu merupakan keyakinan dan haknya yang paling asasi.²⁴

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik garis mengenai pemahaman, penghayatan dan pelaksanaan sila pertama dari dasar negara Pancasila ; Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka nilai-nilai moral Pancasila menuntut tumbuhnya sikap dan perbuatan yang sesuai

²⁴ Kaelan , *ibid.*, hal. 93.

dengan norma-norma moral yang diakarkan oleh agama yang bersumber dari Tuhan. Nilai-nilai agama dengan demikian memperoleh tempat dalam implementasi dan interpretasi pancasila sebagai dasar, falsafah dan ideologi negara, khususnya dalam kaitannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Agar pancasila itu kita amalkan, maka perlu diusahakan secara nyata dan terus - menerus penghayatan dan pengamalan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya oleh setiap manusia indonesia, aatau dengan perkataan lain kita hendaknya berusaha membudayakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila pancasila pada kehidupan setiap warga negara indonesia yang penjabarannya telah ada dalam pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila.²⁵

Dengan demikian sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna bahwa negara dengan segala aspek pelaksanaannya harus sesuai dengan hakekat Tuhan dalam arti kesesuaian negara dengan nilai-nilai yang datang dari Tuhan sebagai kausa prima. Negara mempunyai hubungan yang langsung dedngan manusia sebagai pendukung pokoknya, adapun manusia mempunyai hubungan yang langsung dengan tuhan (sebagai kausa prima).²⁶

²⁵ H. Alamsyah Ratu Perwiranegara, *op. cit.*, hal. 34.

²⁶ Kaelan, *op. cit.*, hal. 95.

BAB III

HAKEKAT NEGARA DALAM KEHIDUPAN BANGSA INDONESIA

A. Makna Negara

1. Dari Segi Etimologi

Istilah negara dari terjemahan kata-kata asing yaitu :

“ Staat “ (bahasa belanda artinya negara)

“ State “ (bahasa inggris artinya negara)

“ Etat “ (bahasa prancis artinya negara)

Istilah “ staat “ (state , etat) dari bahasa latin “ status “ atau “ statum “ artinya menaruh dalam keadaan berdiri , menempatkan. Dari kata latin dialih bahasa dengan istilah “ estate “ dalam arti dewan atau perwakilan sosial, kemudian dalam abad XVI dihubungkan dengan negara.¹

“ Negara “ menurut asal-usul kata berasal dari bahasa sanskerta

“ Nagari “ atau “ Negara “ yang berarti kota . Dalam daerah dari suku-suku di Indonesia ini menerima arti “ daerah “ , “ wilayah “ atau tempat tinggal seorang raja atau” kota “ (negeri, melayu). Dalam bahasa malaysia modern “negara “ atau “negeri “ sama artinya dalam bahasa indonesia. Jadi istilah “ negara “ dalam serjarah berhubungan dengan wilayah, kota dan penguasa. Pengertian “negara” dalam arti luas ialah

¹ Soetomo , *Ilmu Negara* (Surabaya : Usaha Nasional, 1993), hal. 19.

merupakan kesatuan sosial yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama. Menurut kodratnya manusia adalah seorang pribadi sosial yang harus hidup dalam suatu masyarakat supaya bersama dengan manusia lain berkembang. Untuk memenuhi kebutuhan seperti keamanan, pendidikan, prasarana yang luas maka pada tingkat perkembangan tertentu manusia membutuhkan organisasi kemasyarakatan yang mampu mengatur segala hal bersama dan memusatkan perhatian pada kesejahteraan umum. Maka negara dalam arti luas merupakan kesatuan sosial yang diatur secara institusional.²

2. Dari Segi Terminologi

Pada zaman Yunani para ahli pikir telah merumuskan pengertian negara antara lain Aristoteles (384-322) S.M. dalam bukunya yang berjudul “Politika”. Aristoteles masih terikat pada wilayah yang kecil dengan sebutan “Polis”. Pada saat itu polis adalah kota yang dianggap negara, dengan demikian polis itu adalah tempat-tempat tinggal bersama dari orang-orang selaku warga negara dengan pemerintah, yang dikelilingi benteng untuk menjaga keamanan dari serangan musuh.

Polis, negara kota kecil mempunyai penduduk kecil terdapat sejumlah warga negara yang ikut serta dalam permusyawaratan negara (Ecclesia). Negara Yunani Kuno sebagai negara kota atau polis, misalnya Athena, Sparta yang penting adalah susunan pemerintahannya. Rakyat langsung ikut serta dalam pemerintahannya yang demokratis

² Soetomo, *op. cit.*, hal. 21-22.

langsung. Pemerintah itu diselenggarakan dengan mengumpulkan rakyat di suatu tempat yang disebut Ecclesia. Kebijakan-kebijakan pemerintah dipecahkan bersama, mengadakan perbaikan-perbaikan yang perlu diselenggarakan bersama.³

Max Weber, sosiolog dari Jerman mendefinisikan negara :
 “ a state is a human community that (successfully) claims the monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory “ artinya yaitu “ Negara adalah komunitas manusia yang menyatakan monopoli penggunaan legitimasi dari kekuatan fisik dengan pemberian wilayah “ . Definisi yang termasuk ini tidak mendefinisikan negara menurut tujuannya , karena menurut Weber negara dapat melakukan banyak tugas dan mengejar banyak tujuan. Lagi pula, tidak ada tugas yang dapat dikatakan eksklusif dan khas negara. Kekhasan negara adalah bahwa ia boleh memakai kekerasan secara sah, negara tidak boleh memakai kekerasan untuk setiap kasus katanya “ the use of physical force is neither the role, nor even the most usual, method of administration of political organisation “ yang artinya adalah “ penggunaan kekuatan fisik bukan sesuatu peranan dan bahkan bukan suatu yang biasa, cara penyelenggaraan negara dari organisasi politik “. Pada akhirnya penggunaan kekuasaan sangat minim di negara-negara modern. Yang dilakukan oleh negara adalah campuran “ manufactured consent backed

³ Soetomo, *op. cit.*, hal. 20.

by coercion “ artinya “ campuran persetujuan didukung oleh paksaan “. ⁴

Negara merupakan alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Dalam hal ini masyarakat diintegrasikan sehingga mempunyai wewenang yang bersifat memaksa lebih kuat dari pada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat . Negara sebagai agency (alat) dan masyarakat memiliki kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia (dalam hal ini warga negara) dalam masyarakat, serta menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Oleh karena itu negara mempunyai dua tugas : mengatur dan mengendalikan gejala-gejala kekuasaan yang asosial, artinya yang bertentangan dengan satu sama lain supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan. Mengorganisasi dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan kearah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya atau tujuan sosial. ⁵

⁴ Wibowo, *Negara dan Masyarakat : Berkaca Dari Pengalaman Rakyat Cina* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 3-5.

⁵ Munandar Sulaeman, *Ilmu Sosial Dasar : Teori Dan Konsep* (Bandung : Eresco, 1992), hal. 207-208.

B. Hubungan Antara Agama dan Negara.

Menghubungkan antara agama dengan negara tidak terlepas dari asumsi bahwa sesuatu hal yang sangat mustahil bila agama mengajarkan kepada umat manusia kebahagiaan di dunia dan kesentosaan di akhirat, serta mempunyai cita-cita memaslahatkan umat manusia tidak mengajarkan aturan atau etika bernegara. Padahal, negara merupakan suatu pranata yang jelas dapat merealisasikan kemaslahatan umat manusia. Dengan asumsi di atas persoalan agama sebagai landasan bernegara terus diperdebatkan. Termasuk dalam hal : 1) pembagian kekuasaan, falsafah dan wawasan bernegara, keadilan serta khilafah, 2) prinsip-prinsip hukum tata negara (seperti ; dasar konstitusi negara) , Hukum Tata Negara (seperti; dasar konstitusi negara, unsur negara, lembaga serta kepala negara), Struktur pemerintah, hak serta kewajiban pemerintah dan warga negara, dan 3) strategi kenegaraan (seperti; perang dan damai , kebijakan politik dan modernisasi).

Selanjutnya pertanyaannya adalah apakah itu semua mempunyai akar pijakan dari agama atau apakah agama memberikan arah yang jelas terhadap pembentukan suatu negara dengan segala kompleksitas permasalahan yang menghubungkannya. Maka permasalahannya dapat disederhanakan ke dalam dua maksud yaitu: Upaya pembentukan negara yang sesuai dengan ajaran agama. Artinya, bagaimana menemukan bentuk ideal negara yang sesuai dengan konsepsi agama. Pendekatan ini bertolak dari Asumsi bahwa agama mempunyai formula tersendiri tentang agama. Upaya memasukkan ajaran

agama kedalam praktek kenegaraan. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa agama sebagai ajaran etika dan moral tidak mempunyai konsep tertentu tentang negara. Apapun bentuk suatu negara, terserah umat manusia yang memformulasikannya sejauh tidak bertentangan atau menyimpang dari nilai-nilai dasar ajaran agama. Kedua persoalan ini, sebenarnya bertemu pada upaya pencarian sebuah idealitas beragama dan realitas bernegara.⁶

Agama adalah suatu ciri kehidupan sosial manusia yang universal. Artinya, semua manusia mempunyai cara berfikir dan pola perilaku yang memenuhi syarat untuk disebut agama. Selain berhubungan dengan ide, juga merupakan sistem perilaku yang mendasar yaitu amaliah yang berfungsi untuk mengintegrasikan masyarakat, baik dalam perilaku lahiriah maupun yang bersifat simbolik.⁷

Dalam kajian tentu tidak dapat dielakkan untuk menyatakan rumusan dan pendapat yang dijadikan pegangan tentatif. Agama adalah sesuatu yang datang atau dianggap dari tuhan untuk menjadi pedoman bagi manusia dalam mencapai kesejahteraan duniawi dan kebaikan akhirat. Sedangkan kebudayaan adalah produk “aktivitas” intelektual manusia untuk mampu mempertahankan eksistensinya dan memperoleh kesejahteraan serta

⁶ Jeje Abdul Rozak, *Agama dan Kekuasaan : Sebuah Pencarian Perilaku Beragama* (Surabaya: Jurnal IAIN Sunan Ampel Edisi XII, 1998), hal. 22-23.

⁷ Muhammad Yazid, *Agama dan Kebudayaan: Pemahaman Saling Pengaruh Hubungan Agama dan Kebudayaan dalam Perubahan Sosial* (Surabaya : el-ijtima' vol. 1 NO. 3 Desember 2000), hal. 52.

kebahagiaan hidup duniawi. Dengan demikian walaupun keduanya memiliki identitas tersendiri, namun saling bertautan dan mempengaruhi.⁸

Dipandang dari terminologi kebudayaan, agama merupakan kultur universal artinya terdapat di setiap daerah kebudayaan dimana saja dan kebudayaan itu bereksistensi. Agama sejak dahulu hingga saat ini dengan tangguh menyatakan dan menunjukkan eksistensinya. Sehingga mempunyai dan memerankan sejumlah fungsi dalam kehidupan bernegara yaitu meletakkan landasan moral, etika dan spiritual yang kukuh. Agar proses perubahan bisa diperoleh dan bisa diharapkan sepenuhnya untuk diabadikan demi kepentingan kesejahteraan umat manusia bukan untuk menghancurkan umat manusia.⁹

Untuk mengetahui hubungan agama dan negara, maka didalam agama perlu adanya norma agama. Norma agama merupakan seperangkat aturan tentang perilaku yang tersusun dalam sebuah struktur ilmu tertentu yang antara lain terdiri dari prinsip yang membentuk norma hukum umum yang dapat diterapkan kepada fenomena sosial yang lebih luas. Norma merupakan sebuah teori yang mengemukakan suatu konsep atau pemahaman tentang sesuatu serta hubungannya dengan konsep yang lebih luas. Oleh karena itu keterkaitan antara sistem norma dengan negara nantinya berfungsi sebagai ketentuan dan petunjuk pelaksana proses penilaian dan sistem norma manusia sebagai “pelaku budaya”. Dalam konteks kultur masyarakat Pancasila sangat erat,

⁸ Muhammad Yazid, *ibid.*, hal. 67.

⁹ Muhammad Yazid, *ibid.*,

bahkan sistem penilaian inilah yang merupakan sarana bagi pola prilaku atau akhlak manusia Indonesia.¹⁰

Bagi Bangsa Indonesia , kebudayaan negara yang dicita-citakan adalah suatu budaya kehidupan bernegara yang tetap mencerminkan kepribadian Bangsa Indonesia dan mampu meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat indonesia. Hal ini bisa terlaksana jika fungsi agama secara tradisional yaitu memberi harapan, makna dan rasa aman serta rasa optimis kepada individu dapat dijalankan.¹¹ Sehingga terjadi hubungan antara agama dan negara secara simbiotik- mutualistik, yaitu hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Dalam hal ini agama memerlukan negara, karena dengan negara agama dapat berkembang. Sebaliknya negara memerlukan agama karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral.¹²

Agama memandang negara sebagai perwujudan dan konsekuensi kodrat manusia sebagai pribadi sosial. Tuhan menghendaki supaya pada tahap perkembangan budaya tertentu, manusia meningkatkan kehidupan bersama dengan membentuk negara. Hal ini dipandang perlu agar nilai-nilai kemanusiaan tertentu dapat berkembang lebih baik daripada di dalam masyarakat tidak beragama. Termasuk nilai-nilai ini antara lain keamanan,

¹⁰ H. Racmmat Djatmika, *Norma-norma Agama dalam Realitas Sosial di Indonesia : Tinjauan Phenomenologik* (Bandung: Mimbar Studi IAIN Sunan Gununjng Jati No. 76 / XII / Januari 1996)., hal. 2.

¹¹ M. Rusli Karim, *Posisi Agama dan Negara: Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara Pada PJP II* (Prisma No. 5 tahun XII mei 1994), hal. 79.

¹² Jeje Abdul Rozak, *op. cit.*, hal. 30.

kebebasan, perlindungan dan kepastian hukum. Maka maksud didirikannya negara adalah kesejahteraan bersama seluruh rakyat yang terhimpun di dalamnya. Hubungan antara agama bersifat kerjasama dan saling mendukung. Agama dan negara dikehendaki oleh tuhan. Namun demikian punya tujuan dan dasar yang berbeda serta menunaikan peranan masing-masing secara berbeda-beda pula. Sebaliknya perbedaan merupakan dasar yang sehat untuk saling melengkapi sebagai rekan dalam usaha yang mulia dan saling membina kerjasama yang erat dan menyeluruh.¹³

Dalam konteks indonesia, dengan menerima Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai salah satu sila mengungkapkan keyakinan bahwa negara terbentuk berdasar kodrat sosial manusia yang diciptakan tuhan. Tuhan menghendaki agar manusia membentuk negara guna mewujudkan nilai dan keutamaan sosial yang harus mekar diantara makhluk ciptaan-Nya. Dari uraian diatas jelas bahwa sila ketuhanan sangat berharga bagi yang beriman pada Tuhan Maha Esa. Sila pertama ini mencanangkan “ kepercayaan dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab “. Sila ini memberi tempat yang terhormat kepada agama dan menjamin eksistensi nyata kehidupan umat beragama serta memberi keleluasaan untuk pembangunan agama yang sehat. Menjamin kebebasan umat beragama untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Sila

¹³ E. Widayat, *Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka: Hubungan Agama dan Negara Pandangan Dari Sudut Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hal. 9.

pertama ini memberikan Negara Indonesia suatu ciri khas yang dapat dirumuskan tidak teokratis tapi juga tidak sekuler.¹⁴

Dengan demikian, agama harus mampu meletakkan landasan moral, etika dan spiritual yang kukuh di dalam kehidupan bernegara bagi proses perubahan pembangunan. Atau secara singkat agama harus menjadi pendorong lahirnya negara yang mempunyai budaya yang berkualitas. Hal ini tercermin dengan menjadikan agama sebagai penentu perkembangan kehidupan dalam negara, sehingga kemajuan yang diperoleh bisa diharapkan sepenuhnya untuk kepentingan umat manusia, bukan menghancurkan umat manusia.¹⁵

C. Konsep Kehidupan Bernegara Agama Budha

Masalah ketatanegaraan dalam Agama Budha tidak diatur secara mendetail.¹⁶ Tetapi ada nilai-nilai yang harus diteladani di dalam ajarannya. Karena konsep-konsep budhist itu sendiri hanya ada di dalam mereka pemimpin suatu bangsa di negara yang mayoritas penduduknya beragama budha. Sehingga mampu mengimplementasikan nilai-nilai budhisme dalam kehidupan bernegara. Di negara pluralisme agama, budaya dan etnis yang berdasarkan Pancasila menyebabkan Agama Budha tidak teokratik.

Hal ini terlihat dalam nilai-nilai demokrasi pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam kitab suci tidak mungkin disebutkan kata-kata musyawarah tersendiri. Tetapi dalam praktek kehidupan sehari-hari sangat dianjurkan. Hal ini terlihat pada sang budha yang pernah mengajarkan

¹⁴ E. Widayat, *ibid.*, hal. 56.

¹⁵ Muhammad Yazid, *op. cit.*, hal. 56.

kepada salah seorang siswanya yang bernama Ananda, bahwa musyawarah untuk mencapai mufakat syarat utama yang dianjurkan untuk mencapai kebahagiaan bangsa. Dalam percakapan antara Sang Budha dengan Ananda yang termuat dalam Digha Nihaya Maha Parinibana Sutta, antara lain berbunyi sebagai berikut :

- “ Apakah kamu pernah mendengar Ananda, bahwa kaum Vajji sering mengadakan permusyawaratan dan permusyawaratan itu dihadiri oleh cukup banyak pesertanya?
- “ Demikianlah yang telah kami dengar, bahwa kaum Vajji sering mengadakan permusyawaratan yang dihadiri oleh cukup banyak peserta “
- “ Selama kaum Vajji mengadakan permusyawaratan yang dihadiri oleh cukup banyak pesertanya itu, Ananda, maka dapatlah diharapkan perkembangan mereka dan bukan keruntuhannya. “
- “ Apakah kamu pernah mendengar Ananda ? bahwa kaum Vajji bermusyawarah dan musyawarah yang mereka lakukan berakhir dengan mufakat dan dengan hasil yang baik, dimana segala sesuatunya dapat diselesaikan dengan damai dan dalam suasana rukun ? “
- “ Demikian yang telah kami dengar, Bhante, bahwa kaum Vajji bermusyawarah dan mencapai mufakat serta mengakhiri permusyawaratan mereka dalam suasana damai serta rukun. “
- “ Selama kaum vajji mengadakan permusyawaratan yang mencapai mufakat dan mengakhiri permusyawaratan dengan damai dan dalam suasana rukun, ananda , dan dapatlah diharapkan perkembangannya bukan keruntuhannya. “

Percakapan tersebut menandakan bahwa musyawarah untuk mencapai mufakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mendasari kehidupan demokrasi yang telah dianjurkan dalam ajaran Sang Budha.¹⁷

¹⁶ Hartono, *Agama Demokrasi dan Transformasi Sosial : Agama Budha dan Nilai-nilai Demokrasi* (Yogyakarta : LKPSM NU DIY , 1993), hal 84.

¹⁷ Hartono, *ibid.*, hal.73.

Nilai-nilai Budhisme diimplementasikan dalam kehidupan bernegara oleh raja Asoka. Dia adalah cucu dari raja Candragupta yang memerintah di Moghadda (273- 232) S.M. . Candragupta pada mulanya seorang raja buangan dari tanah airnya ke Moghadda, akhirnya ia dapat membangun sebuah kerajaan di sana. Jasa terbesar kepada tanah airnya India adalah merebut dan memerdekakan kembali daerah Punjab dan lain-lainnya yang dirampas oleh tentara Iskandar Dzulkarnaen (Iskandar Agung) dari Macedonia yang setelah mangkatnya Maharaja Iskandar semua orang Yunani di usir.

Setelah mangkatnya Candragupta, ia digantikan oleh Bindusara. Setelah itu oleh cucunya Asoka, Asoka naik tahta kerajaan melanjutkan perjuangan kakeknya meluaskan kerajaannya. Ia menjadikan agama Budha sebagai agama kerajaan. Setelah meresmikan agama Budha sebagai agama resmi kerajaan, ia pun berusaha sekuat-kuatnya untuk menyiarkan agama Budha keluar daerah India. Negara tetangga dan lainnya dikirimkan duta-duta untuk menyebarkan Agama Budha. Akhirnya tersebarlah Agama Budha di luar India dengan amat pesat. Seperti di Siam (Thailand), Kamboja, Laos, Vietnam, Tibet, Tiongkok, Korea, Jepang serta Indonesia.¹⁸

Raja Asoka benar-benar mengamalkan kehidupan demokrasi sebagai hakekat musyawarah mufakat dari Sang Budha dengan adanya prasasti batu kalingga No. XXI raja Asoka yang isinya :

¹⁸ Agus Hakim, *Perbandingan Agama : Pandangan Islam Mengenai Kepercayaan Majusi – Shabiah- Yahudi- Hindhu-Budha-Sikh* (Bnadung : Diponegoro, 1996), hal. 176-177.

“ Janganlah kita hanya menghormati agama sendiri dan mencela agama orang lain tanpa dasar yang kuat. Sebaliknya agama orang lainpun hendaknya dihormati atas dasar tertentu. Dengan berbuat demikian, kita telah membantu agama kita sendiri, untuk berkembang disamping menguntungkan agama orang lain. Dengan berbuat sebaliknya kita telah merugikan agama kita sendiri, disamping merugikan agama orang lain. Oleh karena itu barang siapa menghormati agamanya sendiri dan mencela agamanya orang lain semata-mata didorong oleh rasa bakti kepada agama sendiri dengan berfikir, bagaimana aku dapat memuliakan agamaku sendiri ?. Dengan berbuat demikian itu malah amat merugikan agamanya sendiri. Oleh karena itu kerukunan yang dianjurkan dengan pengertian bahwa semua orang hendaknya bersedia mendengarkan ajaran yang dianut orang lain. “¹⁹

Oleh karena itu, hidup umat Budha di dalam negara yang berlandaskan Pancasila selalu melaksanakan “ sila “ yaitu perbuatan yang baik. Sila ini tercermin di dalam “ Paramita “ yaitu sifat-sifat luhur. Paramita yang hendaknya dimiliki adalah sebagai berikut :

a. Dana Paramita.

Dana paramita adalah sifat-sifat luhur yang di dalam hati nurani setiap orang yaitu dorongan untuk beramal dan berkorban, membantu orang lain, tanggap dan peka terhadap penderitaan setiap makhluk. Moral untuk berdana dan berkorban untuk kepentingan orang lain, dalam masyarakat yang serba kompetitif, serba bersaing, dapat luntur dan diganti dengan sifat serakah (lobha).

¹⁹ WALUBI Pusat, *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia* (Jakarta : Departemen Agama RI Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama), hal. 148.

b. Sila Paramita.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sila paramita merupakan sifat-sifat luhur yang senantiasa mendorong setiap makhluk manusia untuk selalu baik berbuat, melakukan perbuatan-perbuatan yang bermoral. Dalam masyarakat modern, dorongan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik ini mendapat tantangan serius. Sehingga Sang Budha mengajarkan agar senantiasa setiap makhluk senantiasa mencintai kehidupan ini, dan berusaha untuk menjaga kualitas kehidupan dengan melatih “ Pancasila Budhis “ dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²⁰

Ketika Sang Budha mangkat saat usia 80 tahun di bulan waisak purnama sidhi tahun 543 S. M.. Tiga bulan sebelum mangkat, Sang Budha memberitahukan kepada para siswanya. Kemudian ada siswa yang bertanya, “ Apakah masih ada dhamma yang belum diajarkan Sang Budha kepada siswanya ? sedang tiga bulan lagi sang budha akan mangkat. Kalau masih ada dhamma yang masih belum diajarkan kepada para siswa setelah Sang Budha mangkat siapakah yang akan meneruskan ajaran sang budha ?. Sabda Sang Budha demikian :

“ Dhamma yang saya ajarkan sebanyak dedaunan saya genggam, di dunia ini masih ada dhamma, sebanyak dedaunan yang ada di lautan. Tetapi semua dhamma harus berdasar ketuhanan dan mengajarkan sifat-sifat luhur, cinta kasih, kasih sayang, simpati dan keseimbangan batin yang tidak tergoyahkan. Ajaran yang tidak berdasar ketuhanan itu bukan dhamma.”²¹

²⁰ WALUBI Pusat, *ibid.*, hal. 151-152.

²¹ Soewondo Martapi, *Ham dan Pluralisme Agama dalam Pandangan Budha* (Surabaya : Pusat Kajian Strategi dan Kebijakan, 1997), hal. 114-115.

Sehingga Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan Dharma yang tercermin ke dalam 4 paramita yaitu : Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, hormat-menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, tidak memaksakan sesuatu agama dan kepercayaannya kepada orang lain.²²

²² Soewondo Martapi, *ibid.*, hal 118-119.



BAB IV

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

AGAMA BUDHA DAN KONSEP TEOLOGINYA

A. Teologi Agama Budha dan Perkembangannya

1. Sidharta Gautama .

Pada tahun 563 S.M. di kampung kapilawastu seorang begawan bernama Sudhodana dengan istrinya Maya dikaruniai anak yang bernama Sidharta. Pada minggu pertama dari kelahirannya, ibunya telah meninggal dunia. Lalu ia dipelihara oleh saudara ibunya, Mahayapati. Anak ini dibesarkan dalam suasana mewah dan nikmat seperti kaum kerabatnya anak-anak raja dan pembesar kerajaan. Dia sampai masa remaja dan kenikmatan mengitarinya. Bapaknya segera mengawinkan dengan anak perempuan seorang amir bernama Yasidhra. Tidak beberapa lama kemudian, mereka dikaruniai dengan seorang anak laki-laki yang diberi nama Rahula.¹

Pangeran Sidarta suka sekali berburu dan pesiar ke taman yang indah, biasa ditemani seorang kusirnya yang bernama Channa. Ketika hendak keluar berburu ia melihat seorang yang terbaring di tanah dengan badan yang amat kurus dan menderit, seorang tua yang sudah bungkuk dengan tangan gemetar, orang yang membawa jenazah dibawa ke

pembakaran, seorang perempuan miskin membawa anaknya yang masih kecil. Sidarta termenung melihat pemandangan demikian sehingga pilu hatinya.²

Sidarta keluar dari Kapilawastu untuk melanjutkan perjalanan mencari rahasia dan hikmah hidup. Pada sore di bulan purnama di bulan waisak (mei) ia duduk di bawah pohon Bodhi (Bodh Gaya) dengan maksud tidak akan meninggalkan pohon itu sebelum mendapat pencerahan. Demikian pada malam itu dilakukan dengan peperangan melawan mara (iblis) dan bala tentaranya, tetapi sidharta menang. Dan pada malam itu ia mendapat pencerahan, cahaya bodhi. Seluruh kemenangan sidharta sebenarnya dicapai dengan tahap :

1. Ia mendapat pengetahuan tentang kehidupan terdahulu.
2. Ia menjadi maha tahu.
3. Ia mendapat pengertian tentang pangkal yang bergantung yang menjadi awal segala kejahatan.³ Maka budha bukanlah nama orang melainkan suatu gelar.

Secara etimologi perkataan “ Budha “ yang artinya bangun.⁴ Orang budha adalah orang “ yang bangun “ artinya orang yang telah

¹ Ahmad Shalaby, *Perbandingan Agama –agama Besar di India Hindhu-Jaina-Budha* (Jakarta:Bumi Aksara, 1998), hal. 115.

² Agus Hakim, *Perbandingan Agama* (Bandung : Diponegoro, 1996), hal. 155-156.

³ Zainul Arifin, *Hinduisme-Budhisme* (Surabaya: Biro Penerbitan dan Pengembangan Ilmiah Fakultas Ushulludin IAIN Sunan Ampel, 1996), hal. 76-77.

⁴ A. G. Honig Jr, *Ilmu Agama* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1987), hal. 165.

bangun dari malam kesesatan dan sekarang ditengah-tengah cahaya pemandangan yang benar. Agama Budha yang didapat dari orang tuanya ialah Sidharta (artinya ; mencapai maksud tujuan). Tetapi biasanya ia disebut Gautama, karena sanak keluarganya menganggap dirinya sebagai keturunan Guru Weda Gautama. Acap kali ia disebut juga Sakyamuni (yakni rahib atau yang bijaksana) dari kaum Shakya karena ia termasuk golongan ksatria keturunan Shakya.⁵

Setelah Budha wafat kira-kira 483 S.M. timbul perbedaan-perbedaan faham dan pandangan para penganut budha. Maka penganut budha pecah menjadi dua golongan yang terbesar, yang terkenal dengan nama Hinayana dan Mahayana. Perpecahannya berkisar pada dua hal, yaitu mengenai pribadi budha dan ajarannya.

b. Mahayana

Mahayana itu bermakna ; kereta besar.⁶ Mahzab ini cenderung mempertahankan makna hakiki ajaran budha. Menggunakan kitab suci tripitaka berbahasa sanskerta. Aliran ini sering kali disebut agama budha aliran utara, karena pada umumnya berkembang di negara-negara Tibet, Mongolia, Tiongkok, Korea dan Jepang.⁷

⁵ A. G. Honig Jr, *ibid.*, hal 166-167.

⁶ Joesoef Sou'yb, *Agama-agama Besar di Dunia* (Jakarta: Al Husna Zikra, 1996), hal. 99.

⁷ Djam'annuri, *Agama Kita :Perspektif Sejarah Agama-agama* (Yogyakarta :Kurnia Kalam Semesta, 2000), hal. 65.

Dua kata yang menjadi kunci ajaran Mahayana, hampir di setiap tulisan-tulisannya adalah Bodhisatwa dan Sunyata. Secara harfiah Bodhisatwa berarti orang hakekat atau tabiatnya adalah Bodhi (hikmat) yang sempurna. Sebelum mahayana timbul, pengertian Bodhisatwa sudah dikenal juga dan dikenakan kepada Budha Gautama sebelum ia menjadi Budha.⁸

Asal segala sesuatu yang ada disebut Adhi Budha. *Adhi Budha* ini mula-mula melahirkan dirinya menjadi lima *Dhyani* yaitu *Wairocana*, *Aksobya*, *Ratuasambawa*, *Amithaba* (terang tiada batas) dan *Amoghasidi*. Lima anak rohani dari *Dhyani Budha* disebut *Dhayani Bodhisatwa* yaitu *Samanthabhadra*, *Wajrapani*, *Ratuapani*, *Awalokiswara*, dan *Wispopani*. Lima *Dhayani Budha* disamping melahirkan lima *Dhayani Bodhisatwa* juga melahirkan lima Manusyi Budha yaitu budha yang hidup sebagai manusia budha dalam periode berbeda dengan nama *Krakucandra*, *Kanakamuni*, *Kasyapa*, *Sakyamuni* (sidharta gautama) sedangkan *Maitreya* sebagai budha kelima yang akan datang. *Dhayani bodhisatwa* ke-empat itulah di Jawa itu *Lokeswara*, berasal dari *awalokeswara* di Jepang disebut *Kwannon* dan di Tiongkok disebut *Kwan Yin* sangat dihormati karena dianggap sebagai penolong dan pelindung manusia.⁹ Dan Manusyi Budha yang

⁸ Harun Hadiwiyono, *Agama Hindhu dan Budha* (Jakarta: Gunung Mulia, 1994), hal. 84.

⁹ Zainul Arifin, *op. cit.*, hal. 100-101.

akan membebaskan manusia berdiam sekarang ini pada alam samawi disebut Tushita.¹⁰

Cita-cita tertinggi bagi Mahayana adalah menjadi Bodhisatwa. Di dalam perjalanan hidup yang panjang itu seorang Bodhisatwa tidak akan dilahirkan ke dalam tempat penyiksaan atau ke dalam keadaan yang tidak menyenangkan di dalam dunia ini. Demikian juga seorang Bodhisatwa tidak diharuskan menyangkal dunia ini. Tetapi menerima keadaan hidup seperti apa adanya, boleh beristri, memiliki kemewahan dan kekuasaan. Ciri yang lain adalah ajaran tentang Sunyata yang artinya kekosongan. Kosong (sunyata) berarti tiada yang mendiami. Oleh karena itu sunyata berarti tiada pribadi (yang mendiami orang). Segala sesuatu adalah kosong, karena itu tidak ada yang dapat diinginkan atau dicari. Bukan hanya dunia yang kosong, melainkan Nirwana bahkan Dharma juga kosong. Kebenaran tertinggi adalah kosong, karenanya tidak dapat dijadikan sandaran kepercayaan. Yang mutlak tidak dapat dipegang, tidak dapat dikenalnya. Sebab yang mutlak tidak memiliki ciri yang membedakan dengan yang lain. Sehingga mencapai nirwana bersama orang banyak.¹¹

c. Hinayana

Hinayana bermakna kereta kecil. Mahzab ini cenderung mempertahankan kemurnian ajaran Budha. Menggunakan kitab Tripitaka berbahasa Pali. Aliran ini sering disebut aliran agama budha selatan, sebab pada umumnya berkembang di Birma, Thailand, Laos, Kamboja.

¹⁰ Joesoef Sou'yb, *op. cit.*, hal. 104.

¹¹ Harun Hadiwiyonó, *op. cit.*, hal. 85.

Di dalam hinayana terdapat dua macam aliran pokok yaitu Theravada dan Sarwastivada. Theravada berkembang di Langka, Birma dan Siam (muangthai). Sedang Sarwastivada berkembang di Mathura, Gandhara, Kasmir.¹²

Aliran Hinayana mempunyai kepercayaan bahwa dunia kita ini telah beberapa kali kedatangan Budha sebagai pengajar kepada manusia supaya terhindar dari penderitaan dan dapat mencapai nirwana. Waktu kedatangan Budha terjadi pada masa yang lama sekali. Untuk periode sekarang ini Sang Budha adalah Sidharta Gautama. Di masa yang akan datang ada lagi Budha yang lain dan masih bersemayam di surga. Pahami ini beranggapan bahwa kelak akan ada Budha yang baru datang di dunia yaitu Maitreya.

Jarak antara Budha dengan Maitreya beribu-ibu tahun. Hinayana menganggap bahwa Budha Gautama itu melebihi para dewa. Hidup harus menurut petunjuk-petunjuk yang diberikan Budha untuk mencapai nirwana. ~~Tiap-tiap orang harus berusaha sendiri dengan tidak~~ mengharapkan pertolongan dari siapapun. Jadi di dalam Hinayana ini untuk mencapai nirwana tanpa mengharapkan orang lain. Karena itu manusia hanya memikirkan kemaslahatan sendiri dan yang diperlukannya untuk menyelamatkan diri dari dunia khayal dan penderitaan itu hanyalah kendaraan kecil.¹³

¹² Zainul Arifin, *op. cit.*, hal. 98.

¹³ Moh. Rifai, *Perbandingan Agama* (Semarang: Wicaksana, 1984), hal. 98.

Jika ajaran itu diiktisarkan secara umum dapat dirumuskan dimikian :

- a. Segala sesuatu bersifat fana dan hanya berada untuk sesaat saja, itulah yang disebut Dharma. Karena itu tidak ada sesuatupun yang dianggap ada dan tetap. Tidak ada “ aku “ yang berfikir, tetapi yang ada adalah pikiran. Tidak ada “ aku “ yang merasa sebab yang ada hanyalah perasaan.
- b. Dharma-dharma itu adalah kenyataan atau realita yang kecil dan pendek, yang berkelompok sebagai sebab dan akibat. Karena pengaliran dharma yang terus- menerus maka timbullah kesadaran “ aku “ yang palsu atau ada “ perorangan “ yang palsu.
- c. Tujuan hidup adalah mencapai nirwana, tempat kesadaran ditiadakan. Sebab segala kesadaran adalah belenggu. Hal ini disebabkan tidak lain karena kesadaran itu adalah kesadaran pada sesuatu.
- d. Cita-cita tertinggi adalah menjadi Arhat yaitu orang yang sudah berhenti keinginannya, ketidaktahuannya dan sebagainya, oleh karena itu tidak pada kelahiran kembali.¹⁴

¹⁴ Harun Hadiwiyono, *op. cit.*, hal. 83.

C. **Pandangan Ketuhanan Yang Maha Esa Terhadap Konsep**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ketuhanan Agama Budha.

Di Negara Indonesia dengan Pancasila yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam ilmu logika disebut subjek (s) dan disebut term. Sehingga makna Ketuhan Yang Maha Esa menunjukkan hakekat abstrak tuhan dan realisasinya adalah berupa nilai-nilai agama (yang datang dari tuhan). Hal ini menimbulkan kosekuensi, terutama pandangannya dalam kehidupan bernegara terutama Agama Budha.

Banyak sekali kitab yang menjadi sumber pengetahuan tentang Agama Budha, sayangnya sudah banyak yang hilang dan tinggal petilan-petilan atau fragmen-fragmen saja. Kitab itu ada yang ditulis dengan bahasa pali, ada yang ditulis dalam bahasa cina dan sanskerta. Kitab yang ditulis dalam bahasa pali dipergunakan oleh aliran Theravada dari golongan Hinayana yang ada di Nepal, Tibet, Cina dan Jepang. Selama kira-kira 4 abad agama budha hidup dari tradisi yang diteruskan oleh pemimpin agama budha pada abad-abad pertama itu. Oleh karena itu, kitab-kitab yang tergolong tua memberika kesan sebagai pengumpulan tradisi yang diteruskan secara lisan, misalnya: pengumpulan khotbah-khotbah, kata-kata mutiara, syair, cerita-cerita, peraturan-peraturan dan sebagainya.

Budhisme pecah menjadi puluhan aliran yang secara garis besar secara praktis dibedakan antara dua aliran besar, mahzhab Hinayana atau mahzab Theravada, Sarwastivada dan mahzab Mahayana yang lebih dikenal

dengan agama budha mahayana. Mahzab Mahayana juga pecah menjadi aliran-aliran yang lebih kecil seperti mahzab Yogacara, mahzab Tantra.¹⁵

Akibat dari gerakan Bhakti, yaitu gerakan yang penyembahan pribadi didasarkan pada kasih dewa yang disembah, digambarkan dalam bentuk manusia. Gerakan ini berpengaruh pada agama budha sejak abad pertama masehi, menimbulkan perbedaan ajaran tentang perlindungan bagi orang budha. Di dalam agama budha Hinayana, Tiratana dari dua kata Ti yaitu tiga dan Ratana yang berarti permata yang arti seluruhnya Tiga Permata Mulia yaitu Budha, Dharma dan Sangha menjadi tempat perlindungan.¹⁶ Tetapi di dalam Mahayana tempat perlindungan itu adalah Para budha, yang akhirnya sampai pada konsep Adih Budha yang diuraikan secara mitologis. Hal ini berpengaruh pada perbedaan makna Ketuhanan Yang Maha Esa bagi Mahayana dan Hinayana.

A. Ketuhanan Yang Maha Esa Mahayana

Penghormatan kepada budha senantiasa semakin bertambah besar untuk mencari kepuasan rasa keagamaan di dalam dogmatika dan filsafat, dengan menyatakan budha sebagai jiwa yang sangat luhur. Budha akhirnya dipersamakan dengan Yang Mutlak. Yogacara menyatakan

¹⁵ Panitia Penyusunan Penterjemahan Sanghyang Kamahayanikan, *Kitab Suci Sang Hyang Kamahayanikan* (Jakarta: Proyek Penterjemahan Kitab Suci Hindhu dan Budha Departemen Agama RI, 1993), hal.8.

¹⁶ Phra Vindhurdhammabharn, *Ajaran Bagi Pemula* (Bandung, Yayasan Bandung Sucino Indonesia, 1992), hal. 11.

bahwa ia termasuk Lokattara “ dunia di atas dunia “. Orang mulai menyatakan tiga perbedaan daripada hakekatnya, sehingga tersusunlah ajaran tentang ketiga ajaran budha : Dharmakaya : “badan hukum “ atau “badan ilmu “. Samboghakaya : “ badan kebahagiaan “ , dalam pernyataan ini budha hanya menampakkan diri kepada para Bodhisatwa. Nirmanakaya : badan yang dipakai budha dalam menyatakan diri di dunia. Di dalam Dharmakaya Budha adalah Yang Mutlak, kekal, tidak berubah dan tanpa sifat-sifat, tidak terkatakan. Dalam beberapa golongan terutama Nepal, Tibet orang mempersonifikasikan ide ini Adhi Budha yakni Budha asali.¹⁷

Dalam agama Hindhu berkembang ajaran Monisme yaitu ajaran bahwa segala sesuatu diturunkan dari satu asas. Segala yang tampak dipandang sebagai bagian dari sesuatu yang lebih tinggi. Dari gejala penampakan yang bermacam-macam itu disimpulkan ada sebab pertama. Sebab pertama ini ada kalanya disebut Prajapati, ada kalanya disebut Brahman. Maka sekalipun diakui ada tiga dewa yang penting yaitu Brahma, Siwa dan Wisnu namun dalam ajaran Trimurti akhirnya salah satu dari ketiga dewa ini dimutlakkan untuk menjadikan yang lain menjadi penjelmaan-Nya. Dalam agama Siwa umpamanya, Siwa dimutlakkan dan disamakan dengan Brahman, sedang Brahman dan Wisnu adalah penjelmaan Siwa.¹⁸

Pada zama Upanishad, adapun asas yang satu itu Brahman dan Atman. Brahman adalah asas alam semesta sedang Atman adalah asas

¹⁷ A. G. Honig Jr, *op. cit.*, hal. 230.

¹⁸ Harun Hadiwiyono , *op. cit.*, hal. 50-51.

Manusia. Tetapi pada akhirnya Brahman adalah Atman. Sesudah zaman agama budha, Brahman disebut dengan bermacam-macam sebutan diantaranya sebagai Para Brahman (Brahman yang lebih tinggi) yang menjelma kedalam brahman Apra Brahman (Brahman yang lebih rendah) yang disebut Purusattama. Di sini Brahman tampak sebagai Tuhan (Iswara). Dari tingkat penjelmaan yang lebih rendah inilah selanjutnya bertahap dialirkan ke alam semesta dan manusia. Penjadian disebut Srsti yaitu pengaliran keluar apa yang secara potensial sudah ada di dalam Brahman. Oleh karena segala sesuatu mengalir dari Brahman, maka segala sesuatu adalah Brahman sendiri. Tiada perbedaan antara Brahman dan Atman.¹⁹

Peranan Mantra mendapat tempat yang sangat penting di dalam ajaran Tantrayana. Karena ajaran menitik beratkan pada mantra maka dipanggil Mantrayana yaitu ajaran yang mengajarkan mencapai kebebasan melalui mantra. Dalam ajaran Tantra ini, Mantra dan Dharani adalah dua hakekat yang saling bergantung satu dengan yang lain. Begitu kita mengucapkan mantra atau lafalnya pikiran kita telah dibentuk oleh suara yang diucapkan atau dipikirkan dan dengan pikiran mana akal kita terbawa pada suatu bentuk fantasi yang melahirkan wujud-wujud dewata dalam bentuknya yang abstrak tapi riil.

Di samping itu setiap pengucapan mantra harus pula mengikuti aturan-aturan yang tetap seperti misalnya mantra yang ditujukan kepada kekuatan dewa harus selalu diakhiri dengan lafal Hum atau Phat. Sedang

¹⁹ Harun Hadiwiyono, *op. cit.*, hal. 52.

untuk dewi diakhiri dengan Swaha (Swah), sedangkan untuk kedua-duanya dapat dipakai kata Namah. Dari aturan ini kita dapat membayangkan apa maksud dengan mantra “ Om Mani Padme Hum “, * mantra yang sering digunakan oleh budhisme Tibet.²⁰

Di antara hakekat ajaran tantra adalah formulasi ajarannya berpedoman pula pada beberapa sistem untuk mencapai kebebasan absolut. Kebebasan yang selalu dicita-citakan lepas dari jentera penderitaan, yang disimpulkan sebagai satu lingkaran kelahiran kehidupan-kematian yang semuanya adalah tidak lain dalam bentuk penderitaan dalam bentuk roda (cakra). Sehingga terkenal dengan sebutan “ Srikalachakratantra “. Dalamnya ada sistem dan nama Adhi Budha atau Paramadhibudha, yang mungkin diperkenalkan di india pada abad ke-10 dan tibet pada abad ke-11. Tuhan (Sri) kalachakra mendapat sebutan Jinapati, Jinendra, Visvabhartra, Jinajanaka. Di dalam Namasangiti ada Manjusri sebagai sebutan dari Sang Adhibudha. Sebab Manjusri merupakan karakter dari Adhibudha yaitu personifikasi dari pengetahuan darimana budha berasal dan lebih dari Bidhisatwa. Prajnaparamita dikenal sebagai Adiprajna dalam teks ortodoks adalah bagian dari Manjusri. Sehingga Adhibudha adalah Manjusri sebab dia Adiprajna.²¹

* Om = kata pembuka mantra atau do'a dan dianggap punya kekuatan gaib; artinya sama dengan amin dalam do'a orang islam. Mani = mutiara atau permata. Padme = teratai atau batin, pusat. Hum mantra untuk dewa.

²⁰ Panitia Penyusunan Sang Hyang Kamahayanikan, *op. cit.*, hal.17-18.

²¹ James Hasting, *Encyclopaedia of Religion and Ethic* (New York Volume XII), hal. 95.

Untuk dapat seseorang melepaskan diri dari roda penderitaan, disamping harus mempelajari sebab akibat dari guru ahli masih ada lagi sistem yang dapat digunakan untuk melepaskan diri dari ikatan fana yaitu melalui :

- a. Mengucapkan mantra atau lafal-lafal yang mengandung arti.
- b. Penyelenggaraan ritual dengan melakukan Mudra (gerak-gerak sikap badan), sikap Asana (duduk) dan tarian untuk mencapai Trans sehingga pikiran itu manunggal dengan yang absolut, Adibudha.
- c. Pengamatan yang sempurna tentang Adibudha, sehingga di dalam melakukan samadhi itu telah dapat memusatkan pikiran terarah menurut hakekat dan kebenaran yang setepat-tepatnya.²²

Dalam ilmu Tantra, konsep Skanda telah ditingkatkan ketingkat yang sama dengan Budha. Lima Skandha atau lima unsur yang menyusun hidup manusia yaitu Rupa (tubuh), Wedana (perasaan), Samjna (pengamatan), Samskara (kehendak) dan Wijnana (kesadaran). Diajarkan bahwa budha terdiri dari lima skandha, dan tiap skandha adalah seorang tokoh budha yang disebut Tataghata (di Tibet di sebut Jina berarti yang menang atau penakluk). Kelima Tataghata juga disebut Dhyani Budha. Kelima Tataghata itu adalah Wairocana (yang menerangi), Aksobya (yang tenang), Ratnasambhawa (yang dilahirkan dari permata) , Amithaba (terang yang kekal), Amoghasidi (keuntungan

²² Panitia Penyusna Sang Hyang Kamahayanikan, *op. cit.*, hal. 16.

yang tidak binasa). Para Tataghata adalah budha yang senantiasa tidak pernah menjadi manusia, sedang budha yang biasa menjadi manusia.²³

Adibudha juga dipanggil Sanghyang Kamahayanikan.²⁴

Sebagaimana dikatakan :

Im ! Namō Buddhaya ! Im !

Nihan Sang Hyang Kamahayanikan ya warahakna mani ri kita ng Tataghatakula Jinaputra, Adhikarma Sang Hyang Kamahayana, ya ta warahakna mami ri kita.

Artinya : segala puji bagi Sang Hyang Adhibudha. Inilah Sang Hyang Kamahayanikan yang hendak kuajarkan kepadamu, kepada putra budha yang juga keluarga tataghata, keagungan pelaksanaan Sang Hyang Mahayana itulah yang hendak kuajarkan kepadamu

Jinaputra diterjemahkan dengan istilah putra budha yang analogi tidak lain dari pada Tataghata. Adikarmika dapat diterjemahkan dengan “Ketuhanan “ sehingga dalam rangkaian kalimat diatas berarti ajaran tentang Ketuhanan Sang Hyang Kamahayanikan.²⁵

Dengan lima macam perenungan (dhyana) [†] Adhibudha[⊗] atau

Paramadhibudha, Mahabudha mengalirkan dari dirinya lima budha yang disebut Dhayani Budha yaitu : Wirocana, Aksobya, Ratnasambawa,

²³ Harun Hadiwiyono, *op. cit.*, hal. 87.

²⁴ Sang = Si (penghormatan), Hyang = Dewa (suci), Ka = Sebab, Maha = Besar, Ya = Ia, Nikan = Nika-an (Nika dari kata Ika = itu, yang) . Lihat S. Wojowasito, *Kamus kawi- Indonesia* (C. V. Pengarang, 1997.)

²⁵ Panitia Penyusunan Sang Hyang Kamahayanikan, *op. cit.*, hal. 79.

[†] dalam agama Hindhu dinamakan Srsti yaitu pengaliran keluar apa yang secara potensial sudah ada di dalam Brahman.

[⊗] Adhi yaitu permulaan atau pertama Budha yaitu Sang budha maka Adhi Budha adalah Budha permulaan atau pertama.

Amithaba dan Amoghasidi. Melalui kekuatan perenungan masing-masing Dhyani Budha melahirkan Dhyani Bodhisatwa yaitu : Wairocana melahirkan Samanthabhadra, Aksobya melahirkan Wajrapani, Ratnasambhawa melahirkan Ratnapani, Amithaba melahirkan Patmapani, Amoghashidi melahirkan Wispani. Para Dhyani dianggap sebagai pencipta alam bendani. Akhirnya para Dhyani bodhisatwa memantulkan diri pada lima budha dalam bentuk manusia disebut manusya Budha yaitu Krakuchanda, Kanakamuni, Kasyapa, Sakyamuni dan Maitreya.²⁶

Maka Tuhan Yang Maha Mutlak, yang paling awal, tidak berawal, tidak diciptakan, berada dengan sendirinya, Yang Maha Esa yaitu Sang Hyang Adhibudha. Sifat-sifat Ketuhanan-Nya meliputi Metta (persahabatan yang menyeluruh), Mudita (rasa bahagia) Upheka (batin yang tenang) dan Karuna (belas kasih universal). Untuk mengembangkan sifat-sifat ketuhanan terdapat beberapa cara yang harus dilakukan setiap budhis. Pertama, adalah cita kasih, disamping membersihkan pikiran dari sifat benci. Kedua, adalah bhawana mengarah pada upaya menenangkan batin. Bila sifat-sifat ketuhanan sudah dikembangkan dalam diri melalui perilaku baik seseorang akan mendapatkan pikiran bersih. Ia akan mampu berada pada suatu tempat kebahagiaan (Brahma Vihara). Dalam keadaan seperti ini metta, mudita, karuna dan upheka menguasai setiap gerak hidup dan kehidupan budhis. Dengan terwujudnya Brahma Wihara pada diri manusia maka hakekat Adibudha terwujud dalam diri melalui

pengamalan. Pada saat ini seorang budhis menyatu dengan sifat-sifat kebudhaan Adhi Budha. Sehingga Ketuhanan Yang Maha Esa bagi budha Mahayana terkait dengan Srikalacakratantra yaitu Adhibudha sebagai Tuhan Yang Maha Esa, dengan nilai keagamaan berupa metta, mudhita, upheka dan karuna.²⁷

B. Ketuhanan Yang Maha Esa Hinayana.

Di dalam pokok-pokok ajaran budha hinayana ada salah satu unsur yang sangat penting yaitu Triratna atau tiga permata. Tiga permata terdiri dari Budha, Dhamma dan Sangha. Masing-masing disebut sebagai permata sebab merupakan sesuatu yang sangat bernilai bagi kehidupan umat budha. Budha memiliki nilai kesucian yang sangat tinggi. Sangha atau orang-orang suci budhapun memiliki nilai kesucian yang sebenarnya sama, tidak berbeda sedikitpun. Bahkan tiga permata itu masing-masing memuat nilai kesucian mutlak. Yang mutlak dalam ajaran budha bersifat esa atau tidak merupakan perpaduan. Itulah hakekat Ketuhanan Yang Maha Esa dalam agama Budha Hinayana yaitu Sang Tiratana.²⁸

Maka ketuhanan Yang Maha Esa dalam pandangan agama Budha Hinayana merupakan Triratna yaitu Budha, Dhamma dan Sangha yang mempunyai esensi esa. Tiga rangkaian ini merupakan kesaksian keimanan yang berbentuk credo (syahadat) yang berbunyi sebagai berikut :

²⁶ Syamsul Arifin, *Hindhuisme dan Budhisme dalam Lintasan Sejarah Agama* (Surabaya: Alpha Graphika, 1996), hal. 23.

²⁷ Syamsul Arifin, *ibid.*, hal. 25-26.

²⁸ Djam'annuri, *op. cit.*, hal. 68-69.

- a. Budham Saranam Gachami : saya mencari perlindungan kepada Sang
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Budha.
- b. Dhamman Saranam Gachami : saya mencari perlindungan kepada
Dharma (hukum-hukum agama).
- c. Sangham Saranam Gachami : saya mencari perlindungan kepada sangha
(orde pendeta).²⁹ Dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Budha

Secara etimologi perkataan Budha terbentuk dari kata kerja
“Budh “ yang artinya bangun; bangun dari dalam kesesatan dan
keluar ditengan-tengah cahaya pemandangan yang benar. Budha
adalah orang yang mendapat pengetahuan dengan tidak mendapat
wahyu dari tuhan dan bukan dari seorang guru sebagaimana
disebutkan dalam Mahavaga 1, 67, yaitu :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
“ aku sendiri yang mendapat pengetahuan, akan kukatakan
pengikut siapa aku ini, aku tidak mempunyai guru, aku guru
yang yang tidak ada bandingannya. “³⁰

Secara terminologi Budha bukan nama orang melainkan
gelar. Nama pendiri agama ini ialah Sidharta Gautama atau biasa
juga disebut Cakyamuni artinya orang tapa dari keturunan Cakya.

²⁹ H. M. Arifin, *Menguak Misteri Ajaran-ajaran Agama Besar*
(Jakarta : Golden Terayon Pers, 1986), hal. 46-47.

³⁰ Moh. Rifai, *op. cit.*, hal. 92.

Sebutan ini diberikan kepada mereka yang telah mencapai “Bodhi “ yaitu ilmu pengetahuan yang tinggi dan sempurna dan telah mendapatkan jalan melepaskan diri dari kekangan karma.

Agama Budha yang kita kenal dalam sejarah sebagai agama budha anak raja dari Kapilawastu india, bernama Sidharta. Ia dilahirkan 563 S.M. di taman Lumbini Kapilawastu. Putra seorang raja yang bernama Sudhodana dan ibu bernama Maya. Menurut dongeng-dongeng orang budha, ketika ibu Sidharta mengandung para ahli nujum ayahandanya mendapat keterangan bahwa putranya kelak akan menjadi pemimpin besar yang mempunyai salah satu kedudukan tinggi dengan nama Kharawatin (maha raja besar) atau Budha.³¹

Dari kecil Sidarta ditempatkan dalam sebuah istana yang indah dan nyaman, diberi pelayanan hamba sahaya yang tampan, cantik, ramah dan riang. Segala kebutuhan dan keperluan disediakan dengan lengkap. Semuanya dalam rangka usaha Sidarta tidak mengenal susah dan sengsara. Kemudian dalam usia 16 tahun dikawinkan dengan putri jelita bernama Yashodara, yang usianya bersamaan besar dengan sidharta. kepadanya diberikan tiga buah istana yang serba mewah.³²

³¹ Agus Hakim, *op. cit.*, hal. 154.

³² Agus Hakim, *op. cit.*, hal. 154-155.

2. Dhamma.

Dhamma disitu dimaksudkan pokok-pokok ajaran.³³

Dhamma lebih luas kalau dibandingkan dengan ajaran agama dan semua ajaran disebut dhamma. Sehingga kita dapat merumuskan Dhamma adalah segala sesuatu yang membawa kita hidup ajaran bahagia. Semua agama adalah Dhamma maka semua semua ajaran agama dapat membawa kebahagiaan hidup manusia yang percaya dan menyakini kebenaran ajaran agama.³⁴

Dhamma merupakan inti ajaran agama yang dirumuskan dengan nama empat kebenaran mulia atau empat Aryasatya. Ajaran ini diajarkan Budha Gautama di Benares sesudah mendapat pencerahan. Empat kebenaran yang mulia (arya = utama, satyani = kebenaran).³⁵ Dengan penjabaran sebagai di bawah ini yaitu :

1. **Dukha** artinya penderitaan.

Kelahiran ,hidup, umur, sakit adalah penderitaan.

Dengan singkat kehidupan di dunia ini adalah penderitaan.

³³ Joesoef Sou'yb, *op. cit.*, hal. 81.

³⁴ Soewondo Martapi, *Ham dan Pluralisme Agama dalam Pandangan Agama Budha* (Surabaya: Pusat Kajian Strategis dan Kebijakan, 1997), hal. 115.

³⁵ H. M. Arifin, *op. cit.*, hal. 97.

2. Samudaya artinya sebab.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Penderitaan adalah sebabnya. Yang menyebabkan dilahirkannya kembali orang adalah keinginan kepada hidup dengan disertai nafsu yang mencari kepuasan di sana-sini. Kehausan kepada yang ada dan kehausan kepada kekuasaan.

3. Nirodha adalah pemadaman.

Pemadaman kesengsaraan terjadi dengan penghapusan keinginan secara sempurna, dengan pemisahan darinya dan tidak memberi tempat kepadanya.

4. Marga artinya jalan kepuasan.

Jalan yang menuju kepada pemadaman penderitaan delapan yang disebut delapan jalan kelepasan (eigh folding path) yaitu percaya yang benar, maksud yang benar, usaha yang benar, ingatan yang benar dan samadhi yang benar.³⁶

3. Sangha (masyarakat pendeta).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Para penganut agama Budha terbagi kepada dua macam:

a. Para Bhiksu (para rahib)

Inti masyarakat Budhis sebenarnya terdiri dari para rahib saja. Sebab hanya hidup kerahiban sajalah yang dapat menciptakan suasana yang yang diperlukan untuk mencapai tujuan hidup tertinggi. Hidup kerahiban diatur di dalam kitab Vinaya Pitaka. Dari kitab ini dapat diketahui bahwa hidup para rahib

³⁶ Zainul Arifin, *op.cit.*, hal. 86-87.

ditandai tiga hal yaitu kemiskinan, hidup membujang dan tanpa perkosaan (ahimsa).

b. Para Upasaka (kaum awam)

Pengikut budha yang kedua adalah para kaum awam. Mereka mengakui budha sebagai pemimpin keagamaan, yang menerima ajarannya, namun tetap hidup di dalam masyarakat dengan berkeluarga. Pada hakekatnya kaum awam tidak dapat mencapai nirwana di dalam hidupnya. Namun demikian kedudukan mereka penting. Mereka sudah berada pada awal jalan menuju kelepasan dengan percaya pada budha dan ajarannya. Dan dapat memenuhi lima larangan yaitu : tidak membunuh, tidak mencuri, tidak hidup mesum, tidak berdusta dan tidak minum-minuman keras.³⁷

Tetapi dalam beberapa pembahasan , Adhibudha is Triratnamurti

“ The Three Germ Embodied “ yaitu Adhibudha adalah Triratnamurti “ perwujudan tiga permata “³⁸

Tuhan Yang Maha Esa dalam agama budha mendapat sebutan *Sang Hyang Kamahayanikan, Sang Adhibudha, Adhiprajna, Manjusri* dan *Sang Triratna* tetapi pada hakekatnya sama. Makna Ketuhanan Yang Maha Esa dalam ilmu logika adalah nilai-nilai agama yang datang dari tuhan sehingga Triratna dianggap nilai-nilai agama dari tuhan maka dijadikan

³⁷ Zainul Arifin, *op. cit.*, hal. 96-97.

landasan Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia.³⁹ Sehinga nilai-nilai triratna dapat diaplikasikan dalam kehidupan beragama dan bernegara.

Dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sila pertama yang menjadi falsafah dan dasar negara Bangsa Indonesia menyatakan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu manusia indonesia percaya dan yakin terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan tuntunannya agamanya masing-masing. Di dalam kehidupan beragama di Indonesia, senantiasa dikembangkan sikap saling hoirmat-menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan ajaran agamanya masing-masing.

Dalam hubungan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, semua sekte Agama Budha berkeyakinan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan sebutan berbeda-beda tetapi pada hakekatnya adalah satu dan sama. Sebutan untuk *Tuhan Yang Maha Esa* antara lain *Paramadhibudha*, *Sang Hyang Kamahayanikan*, *Sang Hyang Adhibudha*, *Manjusri*, *Adiprajna*. Walaupun berbeda-beda, namun pada hakekatnya tuhan itu Esa ada-Nya.⁴⁰ Sehingga di dalam kitab suci Udana VIII : 3, hakekat Tuhan Yang Maha Esa dilukiskan sebagai berikut :

³⁸ Lihat pada foot note, James hasting, *Encyclopaediae of Religion and Ethiccs* (New York : 1923 , Volume I), hal. 94.

³⁹ Perwalian Umat Budha Indonesia Pusat, *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama, 1997), hal. xxxi.

⁴⁰ Oka Diputra, Cornelis Wowor, Puriati, *Kuliah Agama Budha untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta : YASADARI, 1997), hal. 12.

“ Ketahuilah O para Bhikku, bahwa ada sesuatu yang tidak menjelma, yang tidak tercipta, yang mutlak, dihaipara Bhikku, apabila tidak ada yang tidak dilahirkan, yang tidak menjelma, yang tidak diciptakan, yang mutlak, maka tidak mungkin kita tidak dapat bebas dari kelahiran, dari penjelmaan pemunculan dari sebab yang lalu. “

Dalam hal ini, Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sesuatu yang tanpa aku, absolut, mutlak, yang esa, yang tidak dapat dipersonifikasikan (Antropomorphisme), yang tidak dapat diterangkan dengan perasaan (Antropopatisme) dan yang tidak dapat dilukiskan atau di gambarkan dalam bentuk apapun.⁴¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

⁴¹ Oka Diputra dan Cornelis Wowor, *Pedoman Dharma Dhuta* (Jakarta : Arya Surya Chandra, 1991), hal. 24.

BAB V

ANALISIS

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

I.. Negara Indonesia selalu terbuka untuk pemikiran-pemikiran dari luar dan telah terbukti ramah terhadap kebudayaan asing. Sehingga pada abad awal budaya Hindhu-Budha mempengaruhi Indonesia. Agama ini memasuki Indonesia lewat interaksi yang lebih populer yaitu mengkhutbahkan ajaran, lalu mengajak para penguasa dan keluarganya pindah ke agama mereka. Saat mereka kembali, orang Indonesia pemeluk Agama Budha tadi mempromosikan ajaran dan filosofi Budha.

Setelah melalui perjuangan yang panjang, akhirnya memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17-8-1945. Sejak saat ini kehidupan Bangsa Indonesia berubah, terutama setelah berhasil membentuk landasan ideal yang memuat nilai-nilai keagamaan.

Pancasila sebagai landasan ideal kehidupan bernegara membahas tentang kehidupan beragama, terutama sila I Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sehingga Negara Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa mengakui adanya enam agama yang eksis yaitu : Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindhu, Budha.

Agama Budha pada awalnya tidak mempunyai konsep teologi yang jelas sehingga Prof. Dr. Ahmad Shalaby ketika membahas Agama Budha sampai pembasan mengenai tuhan yang menyatakan bahwa Agama

Budha kadang lebih mirip kepada segi pengingkaran dari pada segi pengakuan. Karena ada segi pengesampingan soal Ketuhanan maka ada golongan Brahmana pada zamannya telah mengecapnya sebagai Atheism. Karena Negara Indonesia berdasarkan Pancasila yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, maka persoalan kehidupan keagamaan Agama Budha menjadi masalah penting untuk memperkuat kedudukannya di Negara Indonesia.

- II. Ketika BPUPKI terbentuk pada tanggal 29 April 1945 tetapi baru dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dan mulai bekerja tanggal 29 Mei 1945 suatu tanda bahwa Negara Indonesia mulai terbentuk. Pada sidang hari ke-3 Ir. Soekarno mengucapkan pidatonya mengenai lima hal sebagai dasar negara merdeka yaitu :
- 1) Kebangsaan Indonesia,
 - 2) Internasionalisme atau Perikemanusiaan,
 - 3) Mufakat atau Demokrasi,
 - 4) Kesejahteraan Sosial,
 - 5) Ketuhanan yang berkebudayaan.
- Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945 sembilan tokoh nasional membahas asas dasar negara yang dikenal dengan “Piagam Jakarta”. Hasil dari sidang mengenai rumusan dan sistematisasi Pancasila yaitu :
- 1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,
 - 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab,
 - 3) Persatuan Indonesia ,
 - 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.
- Tetapi wakil Kristen dan Katolik keberatan terhadap sila I. Sehingga pada tanggal 18 Agustus 1945

rumusan dirubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan rumusan ini disyahkan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.

Dengan dirumuskannya Pancasila maka dapat diketahui kedudukan dan fungsi di Negara Indonesia yaitu sebagai pandangan hidup Bangsa dan dasar Negara Indonesia. Pandangan hidup sebagai kerangka acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun untuk menata hubungan antar manusia, masyarakat dan alam sekitarnya. Dasar negara berfungsi sebagai dasar filsafat dimana nilai-nilai Ketuhanan merupakan sesuatu hal yang dicita-citakan dan diwujudkan dalam kehidupan Negara Indonesia.

Ketuhanan Yang Maha Esa secara etimologi bahwa imbuhan gabungan ke- / -an dalam ilmu logika sebagai subjek. Karena berkedudukan sebagai subjek maka mempunyai makna abstrak. Maka Ketuhanan menunjukkan hakekat abstrak tuhan dan realisasinya adalah berupa nilai-nilai agama (yang datang dari tuhan). Secara terminologi karena kausa materiil Bangsa Indonesia sejak dahulu telah memiliki nilai-nilai agama, maka ketiga monsemp dasar yaitu keyakinan, pengakuan dan perwujudan dalam perbuatan merupakan hal pokok yang harus diperhatikan dalam ajaran ketuhanan. Sehingga dalam kaitannya dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa mempunyai makna bahwa segala aspek penyelenggara negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari tuhan.

III. Makna negara berasal dari Staat, Etat yang berarti menempatkan. Dalam arti luas negara merupakan kesatuan sosial yang diatur secara institusional untuk meeujudkan kepentingan bersama. Sehingga pada zaman Yunani Kuno dikenal dengan nama *Polis* yaitu tempat tinggal orang-orang selaku warga negara. Oleh karena itu negara mempunyai dua tugas yaitu :

- 1) mengatur dan mengendalikan gejala kekuasaan yang asosial,
- 2) mengorganisasi dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan ke arah tujuan sosial.

Ketika hubungan antara agama dan negara terjadi secara simbolik-mutualistik yaitu hubungan timbal-balik yang sangat menguntungkan. Dalam konteks Indonesia, dengan menerima Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai salah satu sila mengungkapkan keyakinan bahwa negara terbentuk berdasarkan kodrat sosial manusia yang diciptakan tuhan. Dengan demikian, agama harus mampu meletakkan landasan moral, etika dan spiritual yang kukuh di dalam kehidupan bernegara bagi proses perubahan pembangunan

Dalam konteks kehidupan Agama Budha, landasan yang diletakkan adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Sebagaimana tergambar pada kaum Vajji yang sering mengadakan permusyawaratan dan dihadiri banyak peserta. Akhir dari permusyawaratan dalam suasana rukun dan suasana damai. Hal ini diimplementasikan raja *Acoka* dengan adanya prasasti batu kalingga No. XXI raja *Acoka*. Sehingga dalam kehidupan

bernegara yang berlandaskan Pancasila selalu melaksanakan “ sila “ diantaranya Dana Paramita dan Sila Paramita.

IV.

Agama Budha yang dikenal merupakan bentuk dari kata “Budh “ yang artinya bangun. Dan dikenal dengan Sidharta artinya yang mencapai tujuan, serta Gautama karena menganggap dirinya guru Weda Gautama. Dalam konteks Mahayana, Budha adalah hasil dari kelahiran Adhi Budha. Mitologi *Sang Adhibudha* yang dipengaruhi aliran *Tantra (Srikalacakratantra)*. Sehingga *Adhi Budha* dengan sebutan *Adhi Prajna, Manjusri, Sang Hyang Kamahayanikan, Jinapati, Jinendra, Visvabharti* punya hakekat sama. Aliran Tantra juga ada keterkaitannya dengan sistem ketuhanan agam hindhu yaitu, *Para Brahman, Aparah Brahman (pursattama)* dan penjadian ini disebut *Srsti*.

Dalam konteks Hinayana Budha adalah *Sang Tiratana*, karena dianggap sebagai perwujudan Sang Budha berupa paramita (nilai-nilai agama) yang datang dari tuhan. Sedang kelak akan ada budha yaitu *Maitreya* kemudian *Sang Tiratana* dijadikan kredo yaitu *Budham Saranam Gachami, Dhamman Saranam Gachami dan Sangham Saranam Gachami*.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Kesimpulan.

- a. Eksistensi Pancasila dalam kehidupan bernegara yaitu berkedudukan sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara. Dari kedudukan nilai pancasila yang pokok lahir berbagai nilai dan fungsi Pancasila yang melandasi berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b. Di dalam ajaran Agama Budha tiadak ada tokoh yang dipertuhan atau sebutan tuhan pada awalnya. Yang ada nirwana, pemadaman, tidak ada gagasan tentang pribadi yang ada di susasan damai. Kemudian ada tokoh yang dipertuhan dengan berbagai sebutan di dalam Budha Mahayana yaitu AdhiBudha, AdhiPrajna, Sanghyang Kamahayanikan, Manjusri, Jinendra. Sedangkan di dalam Budha Hinayana yaitu Sang Triratna. Tetapi keduanya mempunyai hakekat yang sama karena AdhiBudha sebagai Perwujudan dari Sang Triratna sekaligus sebagai Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Ketuhanan Yang Maha Esa bermakna bahwa nilai-nilai agama atau nilai-nilai tuhan berasal dari tuhan yang tunggal. Sehingga nilai-nilai yang berasal dari tuhan yaitu sila paramita. Sila berarti perbuatan yang baik dan paramita berarti sifat-sifat luhur sebagai nilai Tuhan Yang Maha Esa..

2. Saran.

Masalah Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan masalah yang berhubungan dengan makna kebahasaan, sekaligus nilai-nilai yang terkandung di dalamnya terkait dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa, maka penulis sarankan:

- a. Bagi warga negara Indonesia dan umat beragama budha hendaknya memberi warna dan nilai amaliah berupa nilai-nilai Pancasila berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.
- b. Bagi mahasiswa ushulluddin jurusan Perbandingan Agama hendaknya mempelajari agama lain untuk menambah ilmu pengetahuan dan memperluas pandangannya, dengan tidak berpendapat parsial. Maksudnya kita tidak melihat dari satu sisi saja misalnya dari kekurangan dan kelebihanannya. Karena itu prinsip “ Agree in disagreement “ haruslah dijadikan metode mengkaji agama lain.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB VII

PENUTUP

Dengan mengucapkan Alhamdulillah rabbil 'alamin penulis bersyukur kepada Allah s.w.t. yang telah memberi taufiq serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam bentuk yang sederhana. Sebagai manusia dengan keterbatasan dan kemampuan sehingga kemungkinan tidak terlepas dari kekurangan dan kejanggalan di sana sini. Senantiasa dengan dada yang lapang penulis harapkan saran serta kritik yang memebangun guna perbaikan lebih lanjut dan semua pihak demi kepentingan pribadi khususnya dan kepentingan semua pihak pada umumnya. Semoga penulis skripsi ini besar guna dan berfaedah bagi penulis khususnya dan para pembaca umunya

Akhirnya hanya kepada Allah penulis mengadu , mudah-mudahan selalu menerangi penulis untuk meraih kemajuan yang bermanfaat dalam mengarungi hidup menuju kebahagiaan lahir dan batin di dunia dan akhirat nanti , amin.

Penulis

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993.
- Abdullah, Rozali, *Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993.
- Arifin, Zainul, *Hindhuisme-Budhisme*, Surabaya, Biro Penerbitan dan Pengembangan Ilmiah Fakultas Ushulluddin IAIN Sunan Ampel, 1996.
- Arifin, Syamsul, *Hindhuisme dan Budhisme Dalam Lintasan Sejarah Agama*, Surabaya, Alpha, Grafka, 1996.
- Arifin, H.M., *Menguak Misteri Ajaran Agama-agama Besar*, Jakarta, Golden Terayon Press, 1986.
- BP-7 Pusat, *Bahan Penataran P-4: Pancasila*, Perum Percetakan RI, 1996.
- Chaer, Abdul, *Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1998.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia II*, Jakarta Balai Pustaka, 1996.
- Djatmika, Rachmat, H., *Norma-norma Agama Dalam Realitas Sosiaa di Indonesia Tinjauan Phenomenologik*, Bandung, Mimbar Studi IAIN Sunan Gunung jati No. 76 / XVII / Januari 1996.
- Djam' anuari, *Agama Kita: Perspektif Sejarah Agama-agama*, Yogyakarta, Kurnia Kalam semesta, 2000.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research I*, Jakarta, Andi Offset, 1991.
- Hartono, *Agama Demokrasi dan Transformasi Sosial : Agama Budha dan Nilai-nilai Demokrasi*, Yogyakarta, LKPSM NU DIY, 1993.
- Hakim, Agus, *Perbandingan Agama : Pandangan Islam Mengenai Kepercayaan Majusi- Shabiah-Yahudi-Kristen-Hindhu-Budha-Sikh*, Bandung, Diponegoro, 1996.
- Honig, A.G., *Ilmu Agama*, Jakarta, BPK Gunung mulia, 1987.
- Hadiwiyono, Harun, *Agama Hindhu dan Budha*, Jakarta, Gunung Mulia, 2001.
- Hasting, James, *Encyclopaedia of Religion and Etics*, New York, Volume XII, 1923.

- Ismail, Faisal, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama : Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1996.
- Kaelan, *Filsafat Pancasila*, Yogyakarta, Paradigma, 1996.
- Laboratorium Pancasila Ikip Malang, *Santiaji Pancasila : Suatu Tinjauan Filosofis, Historis dan Yuridis Konstitusional*, Surabaya, Usaha Nasional, 1981.
- _____, *Pendidikan Pancasila di Perguruna Tinggi Negeri*, Malang, Ikip Malang, 1991.
- Martapi Soewondo, *Ham dan Pluralisme Agama dalam Pandangan Agama Budha*, Surabaya, Pusat Kajian Strategis dan Kebijakan, 1997.
- Nazir, Moh., *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988.
- Purwadarminto, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1996.
- Perwira, Ratu, Alamsyah, H., *Kehidupan Beragama Dalam Negara Pancasila*, Jakarta, Departemen Agama RI, 1982.
- Panitian Penyusunan Penterjemahan Sang Hyang Kamahayanikan, *Kitab Suci Sang Hyang Kamayanikan*, Jakarta, Proyek Penterjemahan Kitab Suci Hindhu dan Budha Departemen Agama RI, 1973.
- Perwalian Umat Budha Indonesia Pusat, *Bingkai Teologi Kerukuna Hidup Umat Bergama di Indonesia*, Jakarta, Departemen Agama RI Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama, 1997.
- Phra Vindhurdhammabharn, *Ajaran Bagi Pemula*, Bandung, Yayasan Bandung Sucino Indonesia, 1992.
- Romdon, *Metodologi Ilmu Perbandingan Agama: Suatu Pengantar Awal*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996.
- Rozak, Abdul, Jeje, *Agama dan Kebudayaan : Sebuah Pencarian Nilai Perilaku Bernegara*, Surabaya, Jurnal IAIN Sunan Ampel Edisi XII, 1998.
- Rifa'i, Moh., *Perbandingan Agama*, Semarang, Wicaksana, 1984.
- Shihab, Alwi, *Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung, Mizan, 1998.
- Shalaby, Ahmad, *Perbandingan Agama : Agama-agama Besar di India Hindhu-Jaina-Budha*, Jakarta, Bumi Aksara, 1998.
- Sou'yb, Yusuf, *Agama-agama Besar di Dunia*, Jakarta, Pustaka Al-Husna Zikra, 1983.

Soetomo, *Ilmu Negara*, Surabaya, Usaha Nasional, 1993.

Solaeman, Munandar, *Ilmu Sosial Dasar : Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Bandung, Eresco, 1992.

Wach, Joachim, *Ilmu Perbandingan Agama : Inti dan Bentuk Pengalaman Keagamaan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996.

Wibowo, I., *Negara dan Masyarakat : Berkaca dari Pengalaman Republik Rakyat Cina*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Widayat, E., *Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka : Hubungan Agama dan Negara Pandangan dari Sudut Agama*, Yogyakarta, Kanisius, 1995.

WALUBI Pusat, *Bingkai Teologi Kerukuna Hidup Umat Budha di Indonesia*, Jakarta, Departemen Agama RI Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama, 1997.

Wojowasito, *Kamus Kawi-Indonesia*, C.V. Pengarang, 1997.

Wowowr, Cornelis, dan Diputra, Oka, , *Kuliah Agama Budha Untuk Perguruan Tinggi Negeri*, Jakarta, Yasadri, 1997.

_____, *Pedoman Dharma Duta*, Jakarta, Arya Surya Chandra, 1991.